

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, DAN

Edisi Juli II Tahun 2021 No. 18

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Dr. KH. Surahman Hidayat, MA*

PPKM

*Pemerintah Harus  
Perhatikan  
Wong Cilik*





# Menguji Empati Pejabat Di Situasi Berat

Para pejabat juga harus sensitif dengan kegelisahan publik, karena hari ini masyarakat ada di titik lunglai. Masyarakat tidak punya kuasa, tidak berdaya, bahkan saat ini tidak bisa kemana-mana. Ironisnya lagi seluruh aktivitas tersebut tanpa pernah diberikan kompensasi oleh negara. Jikapun kemudian kompensasi keluar maka jumlahnya tidak sesuai dan datangnya sangat terlambat

**P**PKM darurat kini berganti menjadi PPKM Level 4. Pedas dan Pahit seperti level sambal.

Tidak bisa dipungkiri, publik dipaksa mengingat dan mengenal aneka ragam singkatan atau akronim dalam proses penanganan covid 19 di Indonesia. Awalnya bernama PSBB, lalu bermertamorfosis menjadi PPKM. Maksud hati menghindari kewajiban karantina wilayah yang ditetapkan Undang-Undang, malah justru menunjukkan penanganan pandemi semakin payah cenderung berkepanjangan.

Angka mortalitas yang terus naik dibarengi dengan jumlah pasien yang terpapar kini sudah menginjak angka 3 juta, tidak butuh waktu lama melonjak dari 1 juta kasus.

Pada 23 Juli 2021, data Kemenkes menyebut kasus konfirmasi positif mencapai 3.082.410 dengan positive rate 24,25 persen. penyebaran virus Covid-19 hanya butuh waktu sekitar 32 hari dari 2 juta kasus pada 21 Juni 2021 hingga mencapai 3 juta kasus pada hari ini. Dari angka-angka tersebut merasa cukup dibalut ucapan maaf.

PPKM diterapkan dengan setengah hati, namun disampaikan berlelgak-lenggok bagi setengah dewa. Menantang semua pihak yang mengganggu kebijakan PPKM belum maksimal dengan sikap dan hardikan bahwa semua terkendali serta baik-baik saja.

Hilang nyawa berguguran setiap hari, masih dianggap sebagai angka dan data.

Padahal sejatinya yang hilang merupakan reketan kehidupan dan tentang sejarah peradaban manusia; karena yang hilang dari banyak keluarga hari ini yakni seorang ayah, ibu, kakek, nenek, anak dan saudara juga kerabat. Bukan angka atau sekedar kurva. Ini nyawa yang hilang dari raga.

Ironisnya di saat krisis wabah yang sedang terjadi di Indonesia, sejumlah menteri dan pejabat negara berlelgak kangkuk pergi ke luar negeri dengan beragam macam alasan dan rupa. Raut muka senang, rakyat susah payah. Jika pun di dalam negeri ada pejabat, sebagian sibuk menonton drama sinetron yang tak kunjung habis judul dan ceritanya. Pandangannya justru digunakan untuk menerka akhir

episode dari drama tersebut. Padahal akan lebih baik jika dilakukan untuk menyelesaikan persoalan wabah, tentu akan sangat berharga waktu-waktu yang dilewati di masa pembatasan ini.

Pejabat negara harus mampu menjalankan kewenangan sebagaimana mereka memanfaatkannya. Ada banyak fasilitas yang melekat darinya namun lebih besar lagi tanggung jawabnya. Para pejabat negara harus ada di depan dan memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan untuk menangani wabah ini berjalan dengan efektif, efisien dan minim resiko. Bukan sekedar berleha-leha di rumah menghabiskan waktu menonton sesuatu yang tiada pernah ada dalam realita. Para pejabat juga

harus sensitif dengan kegelisahan publik, karena hari ini masyarakat ada di titik lunglai. Masyarakat tidak punya kuasa, tidak berdaya, bahkan saat ini tidak bisa kemana-mana. Ironisnya lagi seluruh aktivitas tersebut tanpa pernah diberikan kompensasi oleh negara. Jikapun kemudian kompensasi keluar maka jumlahnya tidak sesuai dan datangnya sangat terlambat. Jikapun bansos terbagi ke publik disertai dengan arahan emosional; anggaran negara terbatas.

Padahal ada hak, pun kewajiban. Karena dari setiap keduanya akan memberikan dampak. Hanya kehendak baik yang akan menentukan, bukan sekedar alasan apalagi keluh kesah.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Memperingati Hari Jadi Ke-46

# MAJELIS ULAMA INDONESIA

26 Juli 1975 - 26 Juli 2021

Mendukung kedudukan dan fungsi MUI  
untuk memperkokoh Ukhuwah Umat Islam  
Indonesia baik di Ormas maupun Orpol,  
dalam Menghadirkan Islam yang Wasathiyah,  
Rahmatan til-Alamin, mencintai dan  
menyelamatkan Bangsa dan Negara  
Kesatuan Republik Indonesia.

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Tutup Gerbang Internasional  
saat PPKM Darurat

## Aleg PKS: Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggungjawab

### KUTIPAN

Jakarta (06/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyroti PPKM Darurat yang telah diberlakukan semenjak meningkatnya kasus harian Covid-19.

Namun demikian, menurut pria yang akrab disapa SJP ini menanggapi sikap Pemerintah yang masih membuka pintu gerbang internasional baik itu melalui jalur darat, laut dan udara.

"Kemenhub telah memberikan tanggapan terkait hal ini yang pada intinya bahwa keputusan penutupan gerbang internasional ada di bawah kendali Kemenlu dan Kemenkes. Sedangkan dari Kemenlu juga telah menyatakan bahwa tidak adanya kebijakan penutupan gerbang internasional tidak hanya bertumpu pada Kemenlu, tapi juga pada kementerian lain," terang SJP.

Pada perkembangannya saat ini, lanjut Anggota DPR

asal NTB ini, alih-alih menutup jalur perjalanan internasional, Pemerintah hanya memberlakukan pengetatan perjalanan berupa ketentuan bagi WNA maupun WNI yang akan masuk Indonesia harus menunjukkan sertifikat vaksin dan wajib menunjukkan RT-PCR negatif Covid-19.

"Ketentuan ini tercantum dalam addendum Surat Edaran 8/2021 tentang penerapan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, bagi WNA yang akan masuk ke Indonesia harus melakukan karantina selama 8 hari dan di hari ke-7 wajib melakukan RT-PCR kedua dengan hasil negatif," papar Suryadi.

Anggota Fraksi PKS ini berpandangan bahwa hal tersebut tidaklah cukup, sebab banyak kasus menunjukkan bahwa beberapa orang yang telah divaksin tetap berpotensi tertular dan menjadi penyebar virus Covid-19 varian terbaru.

"Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa Covid-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karakteristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia adalah akibat Covid-19 varian Delta tersebut," tegas SJP.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya berpendapat bahwa perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri.

"Pemerintah juga harus melihat contoh Pemerintah luar negeri seperti Hong Kong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.**

Anggota Komisi V DPR RI

"Pemerintah juga harus melihat contoh Pemerintah luar negeri seperti Hong Kong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru"

internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru," pungkasnya.

Selain itu, kata SJP, fraksinya juga menghimbau agar Kementerian-Kementerian tidak saling lempar tanggung jawab terhadap hal ini.

"Seharusnya Kemenhub, Kemenlu, Kemenkes dan Ke-

menkumHAM segera berkoordinasi untuk menentukan penutupan gerbang internasional. Hal ini perlu dilakukan semaksimalnya agar PPKM Darurat yang dilakukan di dalam negeri tidak sia-sia karena masih adanya potensi masuknya virus akibat diperbolehkannya perjalanan internasional," tutup SJP.

# Aleg PKS: Lagi-lagi Kebijakan Inkonsisten, Disaat PPKM Darurat, TKA Cina Masuk Indonesia

## KUTIPAN

Jakarta (06/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin mempertanyakan Tenaga Kerja Asing yang datang ke Indonesia disaat PPKM Darurat diberlakukan, dan menyatakan bahwa pemerintah inkonsisten terhadap kebijakannya.

"Disaat bangsa sedang susah dan bekerja keras untuk menanggulangi Pandemi Covid 19 ini, malah datang TKA Cina ke Indonesia" Ucap Alifudin dalam wawancaranya (05/07/2021).

Hal tersebut juga akan membuat masyarakat bingung dan tidak percayanya terhadap pemerintah.

"Inkonsistensi ini hampir sama disaat beberapa bulan lalu, yang masyarakat dilarang mudik, tapi TKA Cina lenggang aja" tambah Bang Alif.

Alifudin juga menginginkan kepada Pemerintah, seharusnya Tenaga Kerja Asing dilarang masuk di saat PPKM sedang berlangsung.

"Kita lebaran Idul Fitri gak boleh mudik, saat mau Idul Adha dibatasi juga, tapi kita lihat bersama TKA Cina masuk ke Indonesia" lanjut Alifudin.

Dua Puluh TKA tersebut akan bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.



**H. ALIFUDIN, S.E.,M.M**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Inkonsistensi ini hampir sama disaat beberapa bulan lalu, yang masyarakat dilarang mudik, tapi TKA Cina lenggang aja. Kita lebaran Idul Fitri gak boleh mudik, saat mau Idul Adha dibatasi juga, tapi kita lihat bersama TKA Cina masuk ke Indonesia"

1.030 Pejuang Nakes Gugur  
Selama Covid,

## Politisi PKS: Ini Darurat

KUTIPAN

Jakarta : Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) bersama sejumlah organisasi profesi di bidang kesehatan mencatat seribu lebih dokter, perawat hingga bidan meninggal dunia di tengah pandemi Corona.

Data tenaga kesehatan atau nakes yang gugur ini tercatat hingga akhir Juni kemarin. Hampir 1.030 nakes telah gugur ditengah pandemi Covid dan menjadi garda terdepan dalam berjuang melawan Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkapkan keprihatinannya atas ribuan nakes yang gugur dalam berjuang menjadi garda terdepan dalam memerangi Covid-19. Menurutnya, harus ada tindakan darurat yang harus dilakukan agar penyelamatan nakes tersebut bisa diatasi.

"Ini adalah darurat. Sudah lebih dari seribu nakes gugur dalam tugas mulia yang tak bisa tergantikan. Mereka adalah pahlawan terdepan dalam melawan Covid-19. Saya

secara pribadi turut berduka atas wafatnya pahlawan-pahlawan mulia kesehatan tersebut," kata Mufida, Senin (5/7/2021).

Bahkan, jelas Mufida, lini terdepan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit rawan kasus kematian nakes karena menjadi garda awal dalam penanganan Covid dan sangat rawan tertular positif Covid-19. Dan hal itu terbukti banyaknya nakes yang tertular karena interaksi langsung dengan pasien Covid.

"Nakes bagian IGD rawan tertular Covid. Karena mereka gerbang awal ketika menerima dan menangani pasien Covid. Meski kita mengetahui semua nakes baik dokter dan perawat rawan tertular," terang Mufida.

Fenomena di Indonesia, menurut Anggota DPR RI Dapil Jakarta 2 yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini menjelaskan juga bahwa para nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan primer, yang bukan melayani pasien Covid-19 secara khusus pun rawan tertular Covid.

"Ini harus segera diatasi dan dicari solusi terbaik. Jika tidak akan banyak nakes yang berguguran dan Indonesia akan minus nakes. Ini yang akan menjadi masalah ke depan," ungkapnya.

Karena itu, jelas Mufida, Pemerintah merespons banyak kematian nakes dengan membentuk Satgas Perlindungan Nakes serta membuat program untuk meningkatkan perlindungan tenaga kesehatan yang bekerja bukan di fasilitas pelayanan kesehatan khusus Covid-19.

Selama ini sepertinya semua terlalu fokus pada pencegahan dan perlindungan hanya pada rumah sakit yang melayani pasien Covid-19. Padahal, realitasnya angka penularan dan kematian ternyata lebih banyak terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan melayani pasien Covid-19 secara khusus.

Yang penting, tutur Mufida, Kementerian Kesehatan harus segera membuat kebijakan secara nasional tentang pengaturan beban kerja tenaga kesehatan selama pandemi.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

“Harus ada perbaikan sistem pelaporan dan keterbukaan data infeksi dan kematian tenaga kesehatan. Hal ini penting karena tanpa adanya data yang akurat dan terbuka”

Hal ini penting karena telah banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi selama era pandemi telah berpengaruh terhadap tingginya angka infeksi dan kematian tenaga kesehatan.

"Selama pandemi, tenaga kesehatan telah bekerja dengan

intensitas waktu kerja yang panjang dan dalam lingkungan yang berat. Kelelahan, beban kerja yang ekstra berat dan semakin minimnya nakes menjadi masalah tersendiri dalam penanganan Covid-19.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# PEKERJAAN DI INDONESIA MASIH BERPRODUKTIVITAS RENDAH



**PKS Meminta Pemerintah** untuk Mendorong Pertumbuhan Produktivitas Pekerja yang Lebih Menyeluruh.



- **Penyerapan tenaga kerja tertinggi** selama dua dekade adalah **67,5%** pemuda dan orang dewasa dalam angkatan kerja dan **pengangguran turun ke level terendah di 5,2% terjadi pada tahun 2019.**
- Meskipun lapangan pekerjaan dibuka sangat banyak, **Indonesia tidak dapat menciptakan pekerjaan kelas menengah** dengan **gaji sekitar 3,8 juta/bulan.**

## Faktor:

- Tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan yang diperlukan untuk mengambil pekerjaan baru
- Belum ada peningkatan kreativitas pengambil kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja kelas menengah.



**2/3**

Dari  
**85 JUTA  
ORANG**  
berpenghasilan

merupakan pekerjaan berkualitas rendah

- hanya **13 juta** yang memperoleh pendapatan yang cukup untuk keluarga dengan 4 orang.
- hanya **3,5 juta** pekerja yang dapat menikmati manfaat sosial penuh.



# Kematian Pasien Akibat Krisis Oksigen, Wakil Ketua FPKS: Selamatkan Rakyat dan Prioritaskan Medis

**KUTIPAN**

Jakarta (05/07) — 63 pasien di RS dr Sardjito meninggal akibat Covid-19, 33 diantaranya karena krisis oksigen medis. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani meminta negara turun tangan mengatasi krisis oksigen ini dan memprioritaskan pasokannya untuk kebutuhan medis.

"Kelangkaan oksigen telah membuat panik masyarakat. Kini diberitakan pasien di rumah sakit meninggal akibat krisis oksigen. Bagaimana mungkin faskes bisa krisis oksigen? Ini sungguh menyesakkan dada. Oleh karena itu, saya kembali meminta pemerintah agar turun tangan memastikan ketersediaan oksigen. Prioritaskan pasokannya untuk rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. Ini persoalan darurat dimana negara harus hadir melakukan langkah antisipatif," ungkap Netty dalam keterangan persnya Senin, (05/07).

Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini menambahkan, krisis

ini menjadi peringatan untuk pemerintah pusat dan daerah agar terus bersinergi memitigasi kelangkaan oksigen medis dengan pengelola rumah sakit dan faskes lainnya.

"Produksi oksigen harus ditingkatkan di masa pandemi ini sebab terjadi peningkatan kebutuhan yang tinggi di rumah sakit dan faskes lainnya. Porsi oksigen yang lebih besar harus diberikan untuk kepentingan medis dibandingkan industri," ujarnya.

Netty mengajak dunia usaha sektor kesehatan untuk bersama-sama berjuang melawan krisis dengan mengedepankan upaya keselamatan

rakyat, bukan bisnis semata.

"Saya meminta perusahaan penyedia oksigen medis bersungguh-sungguh membantu pemerintah dalam mengatasi krisis oksigen. Ini adalah perjuangan dalam membela kedaulatan bangsa dan negara," tandasnya.

Politisi PKS ini meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan oksigen untuk negara lain beberapa waktu lalu.

"Apakah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan ketersediaan yang memadai untuk kebutuhan dalam negeri?" tanya Netty.

Sebagai penutup, Netty mengingatkan pemerintah agar kasus yang terjadi di RS dr. Sardjito tidak terulang kembali.

"Kuncinya adalah negara harus hadir dalam upaya menyelamatkan rakyat melalui perbaikan manajemen pandemi dari hulu hingga hilir. Kita tidak ingin setiap saat menerima informasi yang menyesakkan dada akibat salah manajemen dan moral hazard dalam penanganan pandemi."



**Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Kelangkaan oksigen telah membuat panik masyarakat. Kini diberitakan pasien di rumah sakit meninggal akibat krisis oksigen. Bagaimana mungkin faskes bisa krisis oksigen? Ini sungguh menyesakkan dada. Oleh karena itu, saya kembali meminta pemerintah agar turun tangan memastikan ketersediaan oksigen.

Prioritaskan pasokannya untuk rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. Ini persoalan darurat dimana negara harus hadir melakukan langkah antisipatif

# Anggota FPKS Minta Aparat Berlaku Humanis saat Penertiban PPKM Darurat

KUTIPAN

Jakarta (08/07) --- Tindakan arogan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam penertiban sejumlah warung usaha saat razia di masa PPKM Darurat menuai protes dari anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf.

Bukhori menilai perilaku arogan oknum Satpol PP tersebut tidak bisa dibenarkan kendati memiliki tujuan yang baik.

"Saya bisa memahami komitmen lurus aparat dalam menegakan aturan. Walaupun demikian, tanggung jawab kita terhadap hukum tidak semestinya menghilangkan tata krama kita dalam memanusiasi manusia," ungkapnya.

Politisi dapil Semarang ini juga menyayangkan tindakan oknum aparat yang dinilai represif dan bertindak terlalu jauh dengan cara menyita properti usaha hingga menyempret sejumlah pertokoan yang dinilai melanggar PPKM darurat di Kota Semarang.

"Cara-cara primitif ini harus dihentikan dan tidak boleh berulang. Aparat adalah perpan-

jangtan tangan dari negara yang dituntut memiliki kepekaan sosial tinggi. Ketegasan itu penting, namun yang tidak kalah penting adalah ketegasan melalui keteladanan, pengayoman, dan kesantunan," paparnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi Sosial ini meminta aparat bisa berlaku lebih humanis dan rasional dalam menyikapi dinamika masyarakat dalam menaati aturan pemerintah. Ia meminta aparat bisa lebih sabar dan santun dalam menegur serta menasihati masyarakat yang melakukan pelanggaran. Pasalnya, sejumlah aturan larangan selama PPKM darurat bersinggungan dengan aspek nafkah mereka.

"Rakyat, khususnya para pedagang kecil ini, sesungguhnya tidak memiliki banyak

pilihan. Nafkah mereka tidak ditanggung oleh negara. Wajar apabila masih didapati sebagian dari mereka tetap membuka usaha atau memaksa berjualan demi mencukupi kebutuhan nafkah mereka. Situasi serba sulit saat ini."

Sebab itu, demikian Bukhori, kepekaan sosial dari aparat untuk sudi mendengar dan mengerti keadaan mereka adalah hal paling esensi di samping ketegasan pada aturan. Ini demi menumbuhkan kepercayaan rakyat pada negara dan komitmen mereka untuk patuh pada aturan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang disampaikan dengan hati akan sampai di hati," jelasnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Politisi dapil Jateng 1 ini juga mengapresiasi respons cepat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang segera menegur Kepala Satpol PP Kota Semarang. Menurutnya, sikap Hendi (sapaan Hendrar Prihadi) sudah tepat dan perlu menjadi perhatian serius anak buahnya.

"Sudah tepat dan perlu pastikan tidak lagi berulang. Rakyat akan mencintai pemimpin yang melindungi dan menyangi rakyatnya," pungkasnya.



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Cara-cara primitif ini harus dihentikan dan tidak boleh berulang. Aparat adalah perpanjangan tangan dari negara yang dituntut memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ketegasan itu penting, namun yang tidak kalah penting adalah ketegasan melalui keteladanan, pengayoman, dan kesantunan,"

# HNW: Saatnya Pemerintah Minta Maaf dan Lakukan Gerakan Gotong Royong Nasional Lawan Covid-19

## KUTIPAN

Jakarta (09/07) — Presiden Jokowi dan Pemerintah diminta agar meminta maaf kepada Rakyat Indonesia.

Hal ini menyusul wabah Covid-19 yang makin mengkhawatirkan dan belum bisa dikendalikan bahkan korban terparap dan kematian terus bertambah.

Permintaan maaf itu sebagai bentuk tanggung jawab moral, agar ajakan kepada Rakyat untuk melakukan gerakan gotong royong nasional melawan Covid-19, bisa disampaikan dengan elegan bisa diikuti dan ditaati Rakyat.

"Sebaiknya Presiden Jokowi minta maaf kepada masyarakat karena pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan. Ini penting guna menunjukkan empati untuk selanjutnya melakukan gerakan gotong royong nasional melawan Covid-19, sebelum meminta tolong ke masyarakat Internasional" ujar Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Jumat (09/07).

Haydat Nur Wahid yang

juga Anggota DPR RI Fraksi Partai PKS ini mengingatkan bahwa lebih satu setengah tahun pemerintah gagal mengendalikan wabah Covid-19.

"Bahkan kini semakin meledak yang menyebabkan fasilitas kesehatan kolaps, korban jiwa dokter dan tenaga kesehatan dan tokoh Agama serta anak-anak terus bertambah, serta angka kematian masyarakat terpapar Covid-19 kini tertinggi di dunia," ungkapnya.

"Sangat memprihatinkan. Pemerintah harus memperhatikan bahwa kematian tenaga kesehatan meningkat. Menurut Data di Pusat Digital Laporan Covid-19 tenaga kesehatan yang wafat sebanyak 434 dokter, 367 perawat, 167 bidan, dan lainnya. Ya Allah terima mereka sebagai syuhada, jaga dan sehatkan para tenaga kesehatan,"

papar Hidayat Nur Wahid.

Hidayat Nur Wahid yang juga mantan Ketua MPR RI ini menilai hingga saat ini pemerintah gagal mengajak masyarakat untuk bersama melawan Covid-19. Karena tidak adanya strategi yang jitu dan kepemimpinan yang efektif mengatasi covid-19, serta lebih mementingkan ekonomi dibandingkan keselamatan nyawa masyarakat. Akibatnya perang melawan Covid-19 tidak bisa segera dimenangkan.

"Tingkat penularan Covid-19 di Indonesia sudah mencapai titik dimana banyak Rumah Sakit kekurangan tenaga kesehatan. Sementara itu tenaga kesehatan makin banyak yang terparap, makin banyak juga yang meninggal. Penting jadi perhatian serius Pemerintah, laksanakan kewajiban konstitusi untuk melindungi Bangsa dan Negara termasuk dari Covid-19," ujar Hidayat Nur Wahid yang juga mantan Presiden PKS ini.

Pria yang sering dipanggil HNW ini minta agar Presiden Jokowi dan pemerintah fokus memprioritaskan penyelamatan



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

“Tanpa solidaritas dan kesadaran serta gotong royong nasional akan sulit memenangkan perang melawan Covid-19 yang terlanjur menyebar seperti sekarang ini. Tetapi solidaritas Rakyat untuk makin aktif membantu Negara, akan juga terkait dengan empati Negara terhadap Rakyat, yang antara lain tampil dalam keikhlasan dan ke-legowoan Negara meminta maaf kepada Rakyat Indonesia,”

Bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia dengan mengutamakan penyelamatan para Nakes (dan Rumah Sakitnya), Tokoh Agama, Anak-anak dan umumnya nyawa masyarakat

Indonesia dari amukan wabah Covid-19, sebagai kewajiban dan amanat konstitusi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Resmikan Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno, Doktor Salim Ingatkan Makna Proklamasi Kemerdekaan

## KUTIPAN

Jakarta (08.07) – Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf AlJufri menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno oleh Fraksi PKS DPR RI

yang telah memasuki tahun ke empat sebagai salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai proklamasi secara simbolik dan substantif.

Meskipun secara daring, Salim Segaf Al Jufri mengungkapkan rasa syukurnya tetap dapat bersilaturohlim dengan tamu undangan yang hadir saat meresmikan Launching Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno via ruang virtual zoom meeting (08/07).

“Mungkin kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita tetap bisa bersilaturohlim secara virtual untuk menyatukan hati dan pikiran, mengokohkan komitmen kebangsaan kita,



sehingga senantiasa optimis dalam mengatasi problematika bangsa termasuk dalam menghadapi pandemi ini.” Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Sosial ini menyampaikan tiga makna dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang juga relevan

dengan kondisi kebangsaan saat ini di tengah ujian pandemi Covid-19.

“Yang pertama, proklamasi merupakan pencapaian tertinggi atau kulminasi perjuangan pergerakaan kemerdekaan Indonesia. Teksnya memang sederhana, tapi perjuangan untuk mencapainya memerlukan waktu yang panjang serta pengorbanan yang luar biasa. Pejuang yang gugur tak terhitung jumlahnya, dari generasi ke generasi. Menegaskan perjuangan, mati satu tumbuh seribu.” Jelas Salim Segaf AlJufri.

Selain itu, makna dari proklamasi ialah fakta bahwa proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk perjuangan kolektif bangsa Indonesia, bukan hanya egoisme pribadi.

“Yang kedua, apakah proklamasi kemerdekaan bisa dicapai dengan egoisme pribadi? Faktanya tidak. Proklamasi kemerdekaan adalah bentuk perjuangan



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

“Dengan diselenggarakannya acara ini bisa mengingatkan seluruh generasi bangsa ini agar dapat memahami sejarah perjuangan bangsa dan semangat proklamasi seperti apa yang digaungkan oleh Soekarno”

kolektif bangsa Indonesia. Disana bertemu antara pemimpin perang gerilya seperti Jenderal Besar Panglima Sudirman dan pemimpin politik seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, dan masih banyak lagi.” Tambahnya.

Terakhir, proklamasi adalah pintu gerbang

pembangunan nasional. Menurut Salim Segaf AlJufri, pembangunan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa butuh waktu yang lama dan tidak pernah usai selama negara Indonesia masih berdiri.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Ketua FPKS DPR RI : Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno, **Bentuk Implementasi Nilai Kebangsaan** Dari FPKS

## KUTIPAN

Jakarta (08/07) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyebutkan bahwa lomba baca teks proklamasi mirip suara soekarno ke-4 yang diadakan oleh Fraksi PKS DPR RI ini merupakan bentuk implementasi nilai kebangsaan dan semangat proklamasi kemerdekaan dari PKS

Hal itu disampaikan dalam acara “Launching Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno 2021” (08/07/2021).

Jazuli berharap dengan diselenggarakannya acara ini bisa mengingatkan seluruh generasi bangsa ini agar dapat memahami sejarah perjuangan bangsa dan semangat proklamasi seperti apa yang digaungkan oleh Soekarno. Menurutnya, anak bangsa harus mampu meneladani pengorbanan para pejuang bangsa, dan semangat proklamasi kemerdekaan harus



menggema di dada dan pikirannya. Oleh karena itu, Jazuli menyebutkan alasan FPKS mengadakan Lomba-lomba kebangsaan ini adalah agar tidak adanya rantai yang putus dalam sejarah

perjuangan bangsa, dan juga untuk menghalangi dari orang-orang yang ingin memutus rantai sejarah perjuangan bangsa itu sendiri.

“Dalam acara ini, FPKS juga mengapresiasi kepada kinerja KAPOLRI Indonesia. Sekaligus menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia kepada kepolisian, selaku garda terdepan penjaga dan penegak hukum yang tugasnya juga menjaga nilai-nilai kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini tidak artinya jika supremasi hukum tidak ditegakkan” ujar Jazuli

Dalam acara itu, Jazuli juga berharap semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa diimplementasikan dalam konteks kekinian, karena pada dasarnya negeri ini bisa merdeka karena adanya persatuan. ditambah adanya arus globalisasi yang mengikis sejarah perjuangan bangsa Indonesia, maka dari itu semangat proklamasi harus



## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Dengan diselenggarakannya acara ini bisa mengingatkan seluruh generasi bangsa ini agar dapat memahami sejarah perjuangan bangsa dan semangat proklamasi seperti apa yang digaungkan oleh Soekarno”

menggelora diseluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu pks harus menjadi motor penggerak gelora semangat proklamasi itu.

“Sebagai penutup, FPKS juga berterimakasih kepada seluruh tenaga kesehatan, yang menolong para saudara kita yang berjuang melawan covid-19 ini, maka dari itu PKS turut

hadir membantu para saudara sebangsa setanah air yang menjadi pejuang covid-19 itu. Walaupun hanya dari hal kecil seperti menyediakan makanan bagi tetangga yang melakukan isolasi mandiri, tapi jika seluruh kader PKS melakukan hal itu,

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Jas Merah, Kapolri Memberikan Apresiasi Terhadap Lomba Baca Teks Proklamasi FPKS Di Tengah Pandemi

**KUTIPAN**

Jakarta (08/07) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si mengatakan bahwa bangsa Indonesia bisa sampai di titik ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu

yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Soekarno yaitu jas merah jangsan sekali-kali meninggalkan sejarah.

“Tentunya saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Fraksi PKS DPR RI yg telah menyelenggarakan lomba baca teks proklamasi mirip suara Presiden Bung Karno, karena kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kita terhadap proklamator bangsa Indonesia sekaligus meneruskan semangat perjuangan para pahlawan pendahulu kita”, ujar Listyo dalam kegiatan



Launching Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI pada Kamis (08/07/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri turut menyampaikan saat ini negara

Indonesia sedang mengalami lonjakan Covid-19. Lebih dari 2,3 juta orang terkonfirmasi positif, dan lebih dari 61 ribu orang meninggal dunia akibat covid-19.

“Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa mari kita bersatu menjadikan covid-19 sebagai musuh bersama. Kami menghimbau dan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mematuhi proses dengan disiplin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena berdasarkan penelitian CDC dan WHO, penerapan protokol kesehatan secara ketat sangat efektif dalam mengurangi resiko penularan Covid-19”, paparnya.

Mantan Kepala Bareskrim Polri tersebut juga turut menambahkan saat ini pemerintah telah melakukan langkah-langkah extraordinary sesuai dengan asas solus populasi superman negesto, mulai dari



## Jenderal Polisi Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si

Kapolri

“Tentunya saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Fraksi PKS DPR RI yg telah menyelenggarakan lomba baca teks proklamasi mirip suara Presiden Bung Karno, karena kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kita terhadap proklamator bangsa Indonesia sekaligus meneruskan semangat perjuangan para pahlawan pendahulu kita”

PPKM Mikro, penguatan 3T dan 5M mikro lockdown, melakukan operasi yustisi, dan saat ini kita sedang melaksanakan PPKM Darurat dengan cara mengurangi mobilitas, melakukan

penyekatan berlapis, penguatan 3T di PPKM Mikro, serta upaya penegakan hukum sebagai langkah terakhir.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Duka Mendalam Fraksi PKS atas Wafatnya Dokter Adang Sudrajat

KUTIPAN

Jakarta (05/07) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini atas nama Pimpinan dan Anggota Fraksi PKS mengungkapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Anggota Komisi IX, dr. Adang Sudrajat pada Minggu (4/7/2021) pukul 20.58 WIB di RS Edelweis Bandung, Jawa Barat.

"PKS kehilangan kader terbaik sekaligus pejuang dakwah di parlemen. Semasa hidupnya, beliau selalu dekat dengan kader dan rakyat. Sebagai dokter, beliau juga banyak melakukan layanan kesehatan kepada rakyat secara gratis," kenang Jazuli.

Menurut Jazuli, banyak kenangan, kesan kehangatan dan kebersahaan dari beliau selama berinteraksi dalam rapat-rapat Fraksi maupun DPR RI.

"Pribadi yang tulus dan penuh dedikasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara terutama di tengah pandemi yang melanda bangsa ini

karena beliau ada di Komisi Kesehatan sebagai mitra Kementerian Kesehatan yang menjadi ujung tombak melawan covid-19," ungkapnya.

Almarhum dr. Adang wafat setelah berjuang melawan covid-19. "Semoga sakit dan perjuangan beliau menggugurkan dosa dan sebab diterima amal ibadah beliau. Kami semua bersaksi beliau min ahlii khoir. Semoga Allah menerima amal ibadah beliau dan menempatkan beliau di syurga-Nya. Amiin ya Robbal aalamiin," pungkask Jazuli.

**dr. H. ADANG  
SUDRAJAT,  
M.M.,Av.**

PKS kehilangan kader terbaik sekaligus pejuang dakwah di parlemen. Semasa hidupnya, beliau selalu dekat dengan kader dan rakyat. Sebagai dokter, beliau juga banyak melakukan layanan kesehatan kepada rakyat secara gratis

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Empat Prioritas Utama Kementerian Pertahanan Tahun 2022

## KUTIPAN

Jakarta (06/07) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI melalui pernyataan tertulis (6/7) Anggota Badan Anggaran dan sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta, menyatakan bahwa terdapat empat prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

Kondisi geopolitik dunia, menurutnya, dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector terus berbenah.

"Menurut kami ada empat prioritas Kementerian Pertahanan. Pertama, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," ungkap Sukamta.

Kedua, imbuh Sukamta, kebijakan, regulasi serta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta di optimalkan. Pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja. Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah.

"Ketiga, dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan. Rencana anggaran alutsista yang ribuan triliun pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam

negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," terang Sukamta.

Terakhir, ungkap Sukamta, inventarisir aset tanah kementerian pertahanan untuk mendukung pertahanan negara. Program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua miliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 triliun. Bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat. Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal.

"APBN 2021 menganggarkan Rp136,9 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Alokasi anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2020," tutup Sukamta.



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Badan Anggaran DPR RI

“Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal”

# Fasilitas Kesehatan Ambruk, Aleg PKS Harap Pemerintah **Jangan Libatkan** Kepentingan Ekonomi

**KUTIPAN**

Jakarta (6/7) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan fasilitas kesehatan negara Indonesia tengah kolaps diserang Covid-19. Meski demikian, penting untuk Pemerintah mengambil langkah dalam jangka pendek ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

“Sudah banyak beredar video masyarakat yang antri untuk mendapatkan pasokan oksigen. Ke depan, harus ada kepastian tersedianya tabung-tabung oksigen ke berbagai rumah sakit & fasilitas kesehatan Covid-19. Perbanyak pasokan & stasiun pengisian oksigen, kerja sama dengan industri juga bisa pemerintah lakukan,” ujar Mardani dalam akun twitter pribadi @mardanialisera Selasa (6/7).

Dalam memenuhi pasokan obat-obat, Mardani mengatakan, perlu untuk pasien Covid-19 di berbagai rumah sakit serta apotek rujukan harus terjamin dan untuk penimbun obat yang menjual jauh di atas,

wajib ditindak tegas & diusut.

“Tarik ulur kerap terjadi ketika memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat yang selalu didominasi oleh kepentingan ekonomi. Dan nampaknya hal tersebut masih terjadi jika melihat masih diperbolehkannya WNA datang ke negeri ini,” ujarnya.

Anggota Komisi II ini melanjuti, harus ada sinkronisasi antar pejabat atau lembaga untuk setiap permasalahan bangsa, terlebih di masa pandemi.

“Jangan lagi terjadi pembatasan dengan PPPKM, namun masih menerima tamu asing seperti kedatangan TKA,

ataupun ketiadaan oksigen karena gencar ekspor ke India dan pada akhirnya kita kurang siap menghadapi permintaan dalam negeri,” imbuhnya.

Saat ini, negara berada dalam situasi yang serba sulit. Dukungan masyarakat tidak akan bisa dipaksakan dengan penerahan aparat keamanan atau ancaman hukuman.

“Sudah saatnya Pak @Jokowi beserta jajaran kerja lebih keras & mengerahkan sumber daya yang tersisa. Rangkul kepala daerah yang terbukti memiliki gagasan progresif, begitu juga dengan kelompok masyarakat lain tanpa menaruh curiga lagi latar belakangnya,” tegasnya.

Kebijakan PPKM Darurat bisa memperlambat lonjakan kasus positif. Akan tetapi, menurut Mardani, kurang efektif jika dirancang dengan gagasan ekonomi. Pemerintah harus mengubah paradigma, jika tidak masyarakat akan terus membayar harga tertinggi dalam memerangi pandemi.

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

“Sudah saatnya Pak @Jokowi beserta jajaran kerja lebih keras & mengerahkan sumber daya yang tersisa. Rangkul kepala daerah yang terbukti memiliki gagasan progresif, begitu juga dengan kelompok masyarakat lain tanpa menaruh curiga lagi latar belakangnya”

# Naiknya NTP 0,19 persen, Anggota FPKS Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani

## KUTIPAN

Kabupaten Bone (03/07) — Di sela-sela kegiatan di daerah pemilihannya, Legislator asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menyambut baik data terbaru keluaran BPS,

yang memaparkan adanya peningkatan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,19 persen di bulan Juni 2021.

"Publikasi BPS ini tentu sangat menggembirakan ya, dimana NTP Juni di angka 103,59 dimana sebelumnya di angka 103,39. Meski kenaikan NTP belum merata di seluruh Indonesia, tapi secara nasional memang naik. Tapi ini bukan kondisi terbaik mengingat ancaman pandemi masih sangat mengerikan sehingga perlu ada upaya lebih keras seminimalnya kenaikan konstan tidak turun dan lebih baik lagi peningkatan di perbesar lagi", tutur Akmal.

Akmal menguraikan, bahwa kenaikan NTP Juni 2021

ada dorongan yang cukup signifikan pada kenaikan pada indeks harga hasil produksi pertanian, setelah melalui pemantauan harga-harga di pedesaan pada 34 provinsi di Indonesia. Ia berharap ada validasi yang ketat sehingga tidak ada yang meleset antara data kenyataan di lapangan dengan yang sampai di tulis menjadi bahan publikasi.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa semua angka-angka ini sebagai penyemangat kita semua mulai dari regulator, eksekutor hingga masyarakat petani yang sebagai pelaksana di lapangan untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Di lapangan, minimal di daerah Pemilihannya, ia terus berkomunikasi dengan petani tanaman

pangan dan hortikultura, nelayan, peternak, pembudidaya ikan, dan pekebun tanaman rakyat untuk mengkonfirmasi kesesuaian publikasi data dari pusat dengan kenyataan lapangan di daerah.

"Kenaikan NTP ini sudah merupakan bukti nyata, bahwa sektor pertanian ini relatif kokoh dalam kondisi pandemi. Tapi mesti di ingat juga, tingkat kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi yang notabene masyarakat pedesaan kalo bukan petani, peternak atau pembidaya ikan dan nelayan. Jadi masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan NTP ini sehingga akan perlahan-lahan merubah struktur ekonomi masyarakat Indonesia", urai Akmal.

Adapun yang Pria kelahiran BONE minta dari pemerintah adalah, mengulang kembali yang sering ia suarakan baik di forum Komisi DPR maupun FGD di lapangan bahwa perlu peningkatan alokasi APBN baik di kementerian Pertanian, KKP maupun KLHK. Kementerian kesehatan yang ia sebut ini



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Kenaikan NTP ini sudah merupakan bukti nyata, bahwa sektor pertanian ini relatif kokoh dalam kondisi pandemi. Tapi mesti di ingat juga, tingkat kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi yang notabene masyarakat pedesaan kalo bukan petani, peternak atau pembidaya ikan dan nelayan."

merupakan kementerian teknis yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil terutama masyarakat pedesaan atau poslok bahkan sampai pinggiran batas negara.

"Saya harap indikator peningkatan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan

kenaikan NTP ini konstan naiknya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga dengan begini, secara perlahan, diharapkan akan ada perubahan gini rasio yang saat ini sangat tinggi menjadi gini rasio yang relatif kecil", tutup Andi Akmal Pasluddin.

# Aleg PKS Desak Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Penyuluh Perikanan Bantu

## KUTIPAN

Sumbawa (02/07) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mendesak pemerintah segera memperhatikan nasib dan kesejahteraan para penyuluh perikanan bantu (PPB) agar mereka mendapat perhatian dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan.

"Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka yang telah disampaikan dalam beberapa aksi demonstrasi baru-baru ini agar keinginan mereka bisa terwujud demi menghargai pengabdian mereka yang sudah lama dan optimalisasi kinerja penyuluh perikanan yang lebih baik ke depan," tutur Johan dalam acara audiensi antara penyuluh perikanan bantu bersama Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Jumat (02/07).

Politisi PKS ini mendukung agar seluruh penyuluh perikanan bantu di Indonesia dengan jumlah sekitar 1.998 orang dapat diangkat seluruhnya menjadi PNS tanpa syarat, hal ini mengingat peran mereka

sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh perikanan dan mengatasi permasalahan kurangnya tenaga penyuluh yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Saya minta pemerintah segera membuat keputusan terkait hal ini karena saat ini kita perlu meningkatkan performa kinerja dari seluruh penyuluh perikanan di tanah air agar dapat membantu masyarakat perikanan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik," ujar Johan.

Johan menilai para penyuluh perikanan bantu sangat layak untuk diprioritaskan karena mereka telah memiliki pengalaman lama dan kompetensi untuk menunjang kinerja mereka.

"Para penyuluh tersebut relatif berkompeten dan biasanya mereka telah banyak mengikuti berbagai pelatihan teknis perikanan sehingga akan berpengaruh nyata terhadap kualitas kerja mereka," ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini juga berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dapat mengoptimalkan kegiatan penyuluhan perikanan agar target peningkatan produksi perikanan dapat tercapai baik perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan perikanan.

"Saya yakin melalui sistem penyuluhan perikanan yang efektif, terintegrasi dan sesuai dengan perkembangan zaman maka berperan signifikan dalam memajukan sektor perikanan di tanah air dan dapat bersaing dengan negara lain," urai Johan.

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan saat ini sektor perikanan kita masih jauh tertinggal dibanding negara lain, maka peningkatan peran penyuluh perikanan menjadi sebuah keharusan sebagai ujung tombak terciptanya sistem penyuluhan yang serasi dan terpadu dengan kelembagaan.



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka yang telah disampaikan dalam beberapa aksi demonstrasi baru-baru ini agar keinginan mereka bisa terwujud demi menghargai pengabdian mereka yang sudah lama dan optimalisasi kinerja penyuluh perikanan yang lebih baik ke depan,"

# Anggota FPKS Apresiasi Bulog yang Ambil Beras Petani untuk Program BST dan PKH

## KUTIPAN

Padang (09/07) — Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengapresiasi langkah Bulog yang mengambil stok beras yang dibeli dari petani untuk disalurkan kepada penerima bantuan sosial tunai (BST) dan program keluarga harapan (PKH).

Stok beras yang disiapkan untuk para penerima BST dan PKH itu diserap dari petani yang sedang panen raya di daerah-daerah.

"Dengan menyerap beras petani dalam negeri maka negara mendapat tiga keuntungan yaitu meningkatkan kesejahteraan petani, menguatkan program BST dan PKH berbasis kemampuan dalam negeri dan mewujudkan kedaulatan pangan," papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Menurut Hermanto, dengan dukungan pasokan sumber beras dalam negeri maka kebutuhan akan

terpenuhi dalam waktu cepat.

"Disamping itu penyerapan APBN lebih optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta sangat membantu mengatasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi covid-19," tutur legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto sangat mendukung Bulog agar serius membeli beras petani dalam negeri.

"Hal tersebut guna membantu petani yang sedang kesulitan mencari pembeli sehingga berdampak pada kenaikan NTP (nilai tukar petani)," ucapnya.

"Usahkan beras tidak berasal dari impor karena

pemerintah belum memiliki sistem karantina yang komprehensif untuk mencegah penularan covid-19 dari beras impor," tambah legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Sebelumnya Dirut Bulog Budi Waseso menyebutkan siap melaksanakan penugasan menyalurkan tambahan beras untuk bantuan sosial kepada 10 juta penerima BST dan 10 juta PKH, masing-masing penerima nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram.

Pemberian tambahan bantuan sosial beras mengacu pada instruksi Presiden pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Bansos akan dicairkan seiring dengan penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021. Beras Bulog tersebut berasal dari beras petani yang dibeli saat panen raya sesuai amanah dari Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Beras terjaga kualitasnya dan berada dalam kondisi layak untuk dikonsumsi.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Dengan menyerap beras petani dalam negeri maka negara mendapat tiga keuntungan yaitu meningkatkan kesejahteraan petani, menguatkan program BST dan PKH berbasis kemampuan dalam negeri dan mewujudkan kedaulatan pangan"

# Belum Dirasakan Petani, Legislator PKS **Dorong** **Reformasi** Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

## KUTIPAN

Jakarta (09/07) — Anggota komisi IV DPR RI asal FPKS, drh. Slamet menyoroti banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.

Hal ini merujuk pada data selama periode 2015-2020 pemerintah telah mengeluarkan anggaran dari APBN sebanyak 244,2 Triliun atau rata-rata 48,84 Triliun pertahunnya, namun pengelolaan pupuk bersubsidi ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat banyak.

"Permasalahan yang paling umum adalah banyak petani yang belum merasakan adanya pupuk bersubsidi ini dimana saat musim tanam tiba pupuk bersubsidi tiba-tiba langka. Disisi yang lain potensi distorsi, inefisiensi, dan moral hazard ketergantungan petani terhadap harga pupuk murah sudah terlanjur sangat tinggi, sehingga ketika terjadi kelangkaan pupuk petani masih sulit beralih ke pupuk organik atau pupuk

hayati," ujarnya di Jakarta, Kamis (08/07/2021)

Selain itu, segmentasi harga pasar antara pupuk bersubsidi dan non subsidi juga sangat besar yang menyebabkan perilaku perburuan rente sangat mudah dijumpai. Reformasi pengelolaan menjadi suatu keniscayaan tegas legislator dilipat kota dan kabupaten sukabumi.

Reformasi pupuk nasional bisa dimulai dengan mendorong penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati sebagai pengganti pupuk kimia yang selama ini massif digunakan. Selain itu pemerintah juga dapat mencoba skema subsidi input dan output berdasarkan jenis komoditas yang saat ini sedang dalam tahap pematangan perencanaannya.

Lebih lanjut ia mengatakan, penggunaan pupuk kimia yang sudah massif tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan produksi pertanian khususnya beras secara nasional dimana data kementerian menunjukkan produksi gabah kering giling terus mengalami penurunan selama periode 2018-2020. Penggunaan pupuk kimia juga mendorong terjadinya land fatigue atau kejenuhan lahan pertanian yang mengancam keberlanjutan pertanian pangan kedepannya.

"Jika pengelolaan pupuk subsidi dapat dikelola dengan baik serta perlahan-lahan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, mungkin kedepannya dana 48 Triliun subsidi tersebut bisa langsung diberikan kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka," tegas Slamet.



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Jika pengelolaan pupuk subsidi dapat dikelola dengan baik serta perlahan-lahan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, mungkin kedepannya dana 48 Triliun subsidi tersebut bisa langsung diberikan kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka"



PKS



**Akun Facebook Official  
Fraksi PKS DPR RI**

**BERPINDAH**

dari **Fraksi PKS DPR RI**  
menjadi

**FPKS DPR RI**



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@fpksdprri



PKS TV DPR RI

# Aleg PKS Harap Sentra Vaksin Covid-19 Gratis di Bandara-Stasiun sebagai Upaya **Percepat Vaksinasi**

## KUTIPAN

Tasikmalaya (07/07) — Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka sentra vaksinasi covid-19 di beberapa Bandara dan stasiun disambut baik oleh Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Ia mendukung penuh setiap upaya yang dapat menurunkan jumlah kasus pandemi ini.

"Rencana pembukaan sentra vaksinasi gratis di beberapa bandara dan stasiun diharapkan akan mempercepat vaksinasi covid-19 di Indonesia. Populasi di Indonesia saat ini 271 juta jiwa. Sehingga diperlukan banyak terobosan, agar vaksinasi menjangkau populasi dalam jumlah signifikan," ungkapnya.

Menurut Politisi PKS ini sebagaimana disampaikan oleh seorang pengurus LSM Kesehatan bahwa mobilitas masyarakat menjadi salah satu penyebab cepatnya penularan di masyarakat yang mengakibatkan jumlah kasus positif terus meningkat

terutama jika tidak disertai dengan protokol kesehatan.

"Di Indonesia, populasi yang bepergian atau meninggalkan rumah untuk berbagai kegiatan tahun 2019 mencapai 28,2 persen. Populasi dengan praktek cuci tangan yang tidak benar berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas) 2018, mencapai 50,2 persen," kata Toriq.

Maka, tambahnya lagi, tidak heran kebiasaan ini menjadikan penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin mudah dan cepat. Ia berharap keberadaan sentra vaksin covid 19 di area publik nanti

sekaligus menjadi tempat masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar seputar Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan pihaknya akan membuka sentra vaksinasi covid-19 di beberapa bandara dan stasiun. Vaksinasi covid-19 di bandara dan stasiun ini diperuntukkan khusus untuk para penumpang dengan menunjukkan tiket pesawat atau kereta api.

Beberapa bandara yang telah siap melakukan vaksinasi covid-19 gratis adalah Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Terminal 2 dan 3, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Beberapa stasiun di Pulau Jawa juga telah disiapkan untuk vaksinasi covid-19. Beberapa di antaranya adalah Stasiun Pasar Senen, Stasiun Bandung, Stasiun Cirebon, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Yogyakarta, dan Stasiun Solo Balapan.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

"Di Indonesia, populasi yang bepergian atau meninggalkan rumah untuk berbagai kegiatan tahun 2019 mencapai 28,2 persen. Populasi dengan praktek cuci tangan yang tidak benar berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas) 2018, mencapai 50,2 persen. Maka tidak heran kebiasaan ini menjadikan penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin mudah dan cepat.

# Tanggapi SE Kemenhub Soal Karantina WNA Delapan Hari, Aleg PKS: **Harusnya Tetap 14 Hari** sesuai WHO

**KUTIPAN**

Jakarta (08/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menanggapi aturan baru yang dibuat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan addendum terkait protokol kesehatan perjalanan internasional.

Penetapan addendum perubahan dan tambahan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 ini, lanjut Suryadi, berlaku efektif mulai Selasa (06/07/2021), sampai batas waktu yang ditentukan kemudian.

"Addendum ini dibuat sebagai regulasi tambahan terkait perjalanan luar negeri di masa PPKM Darurat untuk mengendalikannya peningkatan kasus aktif Covid-19 di dalam negeri dan adanya virus SARS-CoV-2 varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta di berbagai negara, termasuk Indonesia serta potensi berkembangnya varian baru lainnya," ungkapnya.

Sebagai pelaksanaannya, tambah Suryadi, Kementerian Perhubungan menerbitkan

Surat Edaran Nomor: SE 47 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Nomor: SE 48 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Covid-19.

"Bagi pelaku perjalanan Internasional, termasuk WNA (Warga Negara Asing) yang akan masuk Indonesia, maka wajib mematuhi protokol kesehatan, yaitu saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR dan wajib menjalani karantina selama 8x24 jam," kata pria yang akrab disapa SJP ini. SJP menambahkan, WNA

akan melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-7 karantina. Jika menunjukkan hasil negatif, maka karantina dinyatakan selesai setelah hari ke-8 dan dianjurkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

"Selain menjalani karantina, WNA yang masuk ke Indonesia harus menunjukkan bukti telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia," terang SJP.

Sebelumnya, imbuh SJP, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada hari Selasa (6/7/2021) menyebutkan bahwa pemerintah hingga saat ini belum menutup pintu masuk untuk WNA ke Indonesia karena semua WNA yang masuk ke Indonesia sudah mengikuti prosedur yang berlaku, di antaranya karantina 8 hari.

"Sebenarnya ada negara yang memberlakukan karantina 14 hari (misalkan di Taiwan) dan ada yang 21 hari (misalkan di Vietnam). Menurut Luhut, Pemerintah melihat dari hasil studinya dan dari negara-negara yang dianggap cukup baik ad-



## H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"PKS juga mendesak agar jangan sampai mafia karantina, kita mewaspadai munculnya oknum di bandara-bandara internasional yang memalsukan data sehingga ada WNA yang tidak menjalani karantina kesehatan,"

alah karantina 8 hari," ujarnya.

Menanggapi Surat Edaran Kemenhub Nomor SE 47 dan 48 Tahun 2021, tambah SJP, addendum Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 Satgas Penanganan Covid-19 dan pernyataan Menko Kemaritiman dan Inves-

tasi di atas, di tengah kasus harian yang terus meningkat, di masa PPKM darurat ini seharusnya ditutup sementara penerbangan internasional.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Aleg FPKS Minta Presiden Turun Tangan dan Tegas Hentikan Masuknya TKA Asing Saat Pandemi

## KUTIPAN

Jakarta (06/07) — Polemik masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali mencuat akhir-akhir ini. Terkuak di saat negara kembali mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Tentu ini menuai kecaman dari banyak kalangan.

Salah satunya berasal dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi menyebut berbagai lintas kementerian mulai dari kemenhub sampai kementu saling lempar tanggung jawab.

Akibatnya, imbu Syahrul, kerja keras pemerintah baik lokal atau nasional terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Menyikapi seriusnya hal itu, dia meminta presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap.

"Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup

kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa" terang Syahrul Aidi.

Saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19, koordinasi perlu langsung di tangan Presiden. Untuk itu, kata

Syahrul Aidi, presiden harus memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Kapan perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini.

"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presiden-lah yang harus bertanggungjawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden." terangnya.

Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul Aidi menilai pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hongkong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru. Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa Covid-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karakteristik cukup mudah menyebar.



## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

"Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa

Bahkan diduga lonjakan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia adalah akibat Covid-19 varian Delta tersebut.

"Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara

harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa varian-nya memang selalu berasal dari luar negeri." terangnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS: **Batalkan** Rencana Penghapusan Insentif PPh UKM!

## KUTIPAN

Surabaya (02/07) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah membatalkan rencana penghapusan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp50 miliar.

Menurut Amin, kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan sekarang mengingat pandemi belum berakhir.

"Terlebih pelaku UMKM bakal terkena dampak negatif dari pemberlakuan PPKM darurat. Pembatasan mobilitas masyarakat pastinya berdampak pada keberlangsungan usaha. Butuh waktu lama untuk pulih," tegasnya.

Rencana penghapusan insentif tersebut dikeluarkan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Lebih lanjut Amin mengungkap, data dari Kement-

rian Koperasi dan UKM sampai dengan akhir tahun 2020 saja sudah ada sudah ada 163.713 pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pengetatan mobilitas ini akan menutup banyak sektor, terutama ritel, transportasi, logistik, dan properti.

Amin mengaku khawatir munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi jika insentif tersebut juga dihapus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,74 juta orang pada Februari 2021. Jumlah pengangguran meningkat 26,3 persen secara tahunan.

"Jika insentif PPh Final dicabut, pasti akan lebih banyak lagi pelaku usaha yang

kapasitas usahanya menurun", tegasnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV itu melanjutkan, ketentuan yang ada di dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan merupakan Pasal tambahan yang dibuat untuk meringankan beban UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang.

Jika itu dicabut, ungkapnya, maka sama saja Pemerintah tidak mendukung UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang. Ia menambahkan, rencana pencabutan intensif PPh Final bagi UMKM juga tidak sejalan dengan Bab V Pasal 92 ayat (4) UU Cipta Kerja, yang memberikan insentif PPh kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Padahal selama ini presiden Jokowi mengklaim sangat mendukung pertumbuhan UMKM.

"Jika presiden Jokowi menyetujui pencabutan insentif PPh yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM. Jangan salahkan masyarakat jika kemudian muncul penilaian tertentu terhadap Presiden Jokowi", pungkasnya.



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Jika itu dicabut, maka sama saja Pemerintah tidak mendukung UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang. Ia menambahkan, rencana pencabutan intensif PPh Final bagi UMKM juga tidak sejalan dengan Bab V Pasal 92 ayat (4) UU Cipta Kerja, yang memberikan insentif PPh kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Padahal selama ini presiden Jokowi mengklaim sangat mendukung pertumbuhan UMKM."

# RDP Komisi VI dengan Dirut PT Pertamina Bina Medika, Aleg PKS Minta **Pelayanan Maksimal** Jadi Fokus Utama

## KUTIPAN

Jakarta (09/07) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Bina Medika IHC,

yang langsung di hadiri direktur utamanya, dalam segala ekspansi pengembangan jaringan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk memberikan fokus utama pada pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Indonesia.

"Terutama pada masa krisis kesehatan akhir-akhir ini, perkembangan kondisi RS yang ada di bawah naungan Pertamina IHC dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terutama pasien covid 19 khususnya mesti diupayakan solusinya yang terbaik", tutur Nevi.

Nevi mengatakan, RS yang menjadi jaringan dari Pertamina Bina Medika IHC sangat luas dapat menjangkau masyarakat Indonesia. Tapi dalam menghadapi gelombang kedua

Pandemi covid 19 yang semakin mengganas, perlu ada upaya yang sangat keras bagi seluruh rumah sakit bukan hanya yang milik pemerintah saja, termasuk rumah sakit swasta untuk menampung masyarakat yang mengalami gejala sedang hingga berat.

"Melakukan holding terhadap seluruh rumah sakit BUMN adalah langkah yg bagus untuk meningkatkan kapasitas dan menyeragamkan kualitas pelayanan. Namun perlu keselarasan tujuan dibentuknya holding ini dengan misi pemerintah dalam melayani rakyatnya. Semua golongan masyarakat Indonesia mesti dapat terlayani oleh seluruh jaringan pertamedika baik masyarakat kurang mampu

hingga masyarakat yang berada. Termasuk bagaimana pertamedika memberikan kebutuhan masyarakat yang ingin mencari pelayanan kesehatan terbaik, dengan menyediakan fasilitas yang mumpuni sehingga masyarakat tidak lagi pergi berobat ke luar negeri", urai Nevi.

Politisi PKS ini menyarankan, agar seluruh pejabat pemerintah mesti berobat ke RS plat milik Negara kecuali untuk fasilitas tertentu yg tidak dimiliki. Perlu ada upaya keras untuk menggesa penyediaan fasilitas tertentu yang tidak ada dan menggiring masyarakat berobat ke luar negeri, menjadi ada, sehingga tidak ada alasan untuk berobat ke luar karena sudah tersedia di dalam negeri. Jangan sampai belasan milyar dollar hilang hanya Karena berobat keluar negeri, sehingga negara kita dapat menghemat dan mengefisienkan semua sumber daya yang ada.

"Saya berharap Kementerian BUMN dapat melakukan pengintegrasian seluruh RS BUMN dengan



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Melakukan holding terhadap seluruh rumah sakit BUMN adalah langkah yg bagus untuk meningkatkan kapasitas dan menyeragamkan kualitas pelayanan. Namun perlu dipastikan, dilapangan terjadi keselarasan tujuan dibentuknya holding ini dengan misi pemerintah dalam melayani rakyatnya”

tujuan untuk meningkatkan fokus bisnis dan kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan sekaligus menargetkan jadi pemimpin pasar dalam bisnis RS di Indonesia. Harapannya adalah

agar dapat meraih kepercayaan masyarakat Indonesia , sehingga masyarakat lebih memilih berobat di RS negeri sendiri, dibanding ke luar negeri", tutup Nevi Zuairina.

# PANDUAN AMAN SAAT ISOLASI MANDIRI

## Kapan harus isoman?

Saat dinyatakan positif covid-19

Saat kontak erat dengan pasien positif covid-19, meskipun setelah itu melakukan test dan hasilnya negatif

Setelah berpergian ke zona merah



Adapun protokol isolasi mandiri (ISOMAN) untuk seseorang yang dinyatakan positif Covid-19 adalah sebagai berikut :



Tidur terpisah dengan anggota keluarga yang lain



Pilih kamar yang memiliki jendela langsung ke luar



Selalu gunakan masker di dalam rumah



Periksa saturasi oksigen berkala, jika < 94% lapor ke petugas medis



Toilet terpisah, jika tidak memungkinkan beri jeda waktu penggunaan 30-60 menit



Tidak makan bersama dengan anggota keluarga yang lain



Cek suhu tubuh 2x sehari (siang & malam, laporkan jika diatas > 37,5°C



Mengonsumsi Vitamin C & D, makan makanan bergizi, olahraga & istirahat yang cukup

# Aleg PKS Persoalkan Tugas dan Fungsi BRIN yang Terlampau Besar

## KUTIPAN

Jakarta (09/07) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan Keputusan Pemerintah untuk menggabungkan semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) riset ke dalam BRIN dapat melanggar Undang-Undang. Karenanya perlu dikaji ulang secara cermat.

Contohnya, kata Mulyanto, adalah peleburan BATAN dan LAPAN ke dalam BRIN.

"Sebab kedua lembaga tersebut dibentuk berdasarkan UU khusus, yakni UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran dan UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan," ungkapnya.

Kedua lembaga ini, imbuh Mulyanto, bukan sekedar lembaga litbang iptek, namun merupakan badan pelaksana Undang-Undang, sehingga tidak dapat dilebur begitu saja ke dalam lembaga yang dibentuk oleh selebar Peraturan Presiden (Perpres).

"Peleburan ini menyebabkan BRIN akan menjadi lembaga super duper yang gemuk sekali. Bagaimana tidak, fungsi-

fungsi Pemerintahan dalam bidang riset dan teknologi akan menumpuk di dalam satu lembaga BRIN ini. Belum lagi tambahan tugas khusus lainnya," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto menilai tugas dan fungsi BRIN terlampau luas dan berpotensi tidak efektif dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Pertimbangannya; pertama, BRIN berfungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam urusan pemerintahan di bidang riset. Kedua, BRIN memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan riset dan teknologi, mulai dari hulu hingga hilir yang mengintegrasikan

pembangunan iptek dari invensi sampai inovasi, bahkan dari pusat sampai daerah.

"Ini adalah dua fungsi Pemerintahan yang sebelumnya dijalankan oleh Kemenristek di masa lalu," imbuh Mulyanto.

Selain itu BRIN juga memiliki fungsi pelaksanaan, yakni menjalankan riset dan inovasi, layaknya sebagai lembaga-lembaga litbang baik yang ada di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun di lembaga litbang kementerian teknis. Sebab BRIN direncanakan menjadi badan yang melebur semua lembaga litbang Pemerintah dalam satu wadah tunggal. Seluruh litbang sektoral ada di sini.

"Bukan hanya itu, BRIN pun akan diserahkan tugas dan fungsi untuk menjadi Badan Pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketenaganukliran, yang selama ini tugas-fungsi itu dilaksanakan oleh BATAN sesuai dengan amanat UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran," papar Mulyanto.

Kemudian BRIN, tambahnya, juga diposisikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

"Peleburan ini menyebabkan BRIN akan menjadi lembaga super duper yang gemuk sekali. Bagaimana tidak, fungsi-fungsi Pemerintahan dalam bidang riset dan teknologi akan menumpuk di dalam satu lembaga BRIN ini. Belum lagi tambahan tugas khusus lainnya"

Keantariksaan, yang selama ini tugas-fungsi tersebut dilaksanakan oleh LAPAN sesuai dengan amanat UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan.

Jadi BRIN ini akan menjadi badan super duper, yang sangat gemuk. Karena bukan saja akan melebur semua lembaga

litbang Pemerintah, tetapi juga ditambah fungsi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, menjalankan urusan Ketenaganukliran, serta menjalankan urusan Keantariksaan

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# PPKM Darurat Diberlakukan, **Aleg PKS Desak Pemerintah Lebih Perhatikan Wong Cilik**

## KUTIPAN

Jakarta (6/7) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Surahman Hidayat, mendesak pemerintah lebih memperhatikan wong cilik,

yang termasuk kelompok rentan dalam menghadapi Bencana Covid-19.

Pemerintah memberlakukan PPKM mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Hal tersebut ditetapkan dalam instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2021 di Wilayah Jawa dan Bali yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi.

Surahman menjelaskan, berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Bali berjumlah 14.217.990 jiwa.

"Jangan sampai

kurangnya perhatian pemerintah pada wong cilik menyebabkan secondary hazard atau ancaman bencana lanjutan dari bencana pandemi covid-19, mulai dari hilangnya mata pencaharian hingga tidak tercukupinya kebutuhan hidup dasar, dan ini sangat berbahaya," ungkap Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 11 ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan angka kasus baru dalam tujuh hari terakhir ini meningkat sangat signifikan di banding sebelumnya.

"Bahkan yang pada tanggal 5 Juli 2021 angka kasus baru tembus 29.745 kasus. Untuk itu negara harus benar-benar hadir untuk rakyat dalam menghadapi bencana pandemi covid-19," pungkas Surahman mengakhiri.



**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Jangan sampai kurangnya perhatian pemerintah pada wong cilik menyebabkan secondary hazard atau ancaman bencana lanjutan dari bencana pandemi covid-19, mulai dari hilangnya mata pencaharian hingga tidak tercukupinya kebutuhan hidup dasar, dan ini sangat berbahaya"

# Banyak Ulama Wafat Dimasa Covid-19, HNW Desak Kemenag dan Baznas Tingkatkan Program bagi Ulama dan Santri

## KUTIPAN

Jakarta (06/07) — Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya jumlah tokoh Agama yang wafat pada era Covid-19.

Covid-19 memang tidak membeda-bedakan latar Agama, tetapi Ulama atau Kiai yang wafat pada era Covid-19 berdasarkan data yang disampaikan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdhatul Ulama hingga 4 Juli 2021 setidaknya 584 kiai wafat selama pandemi covid-19, padahal per Januari 2021 RMI hanya mencatat adanya 333 ulama wafat.

Hidayat meyakini angka tersebut akan bertambah besar apabila ditambahkan data Habaib/Kiai/Ulama/Ustadz yang wafat akibat covid-19 dari Ormas Islam lain selain NU.

Oleh karena itu dirinya mendesak Kementerian Agama agar lebih serius dalam melaksanakan program bantuan dan perlindungan bagi

tokoh Agama, Kiai dan santri yang adalah calon Ulama, diantaranya melalui percepatan vaksinasi bagi tokoh Agama, Kiai/Ulama dan Santri.

Dirinya juga mendorong maksimalnya peran Pesantren, Baznas, hingga Lembaga Amil Zakat untuk memperbanyak program beasiswa bagi santri sebagai calon Ulama dalam rangka meningkatkan program kaderisasi Kiai/Ulama.

“Pemerintah khususnya Kemenag harus lebih serius bantu dan lindungi Tokoh Agama, Ulama/Kiai dan Santri, karena Covid-19 sudah menajutahkan korban dari banyak Tokoh Agama dan Ulama, juga sudah banyak masuk ke Pesantren-Pesantren tempat para Kiai mengabdikan

Apalagi covid-19 varian delta ini lebih ganas, cepat menyebar, dan penularannya masih terus mengalami peningkatan. Seharusnya amanah UU Pesantren yang disahkan 2 tahun lalu yakni pendampingan Pemerintah kepada Pesantren dijalankan dengan lebih maksimal sehingga paparan dan dampak Covid-19 terhadap Kiai/Ulama dan Santri bisa diminimalisir,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya, Selasa (06/07).

Hidayat yang juga merupakan Anggota DPR-RI Komisi VIII membicarakan urusan agama ini menjelaskan, dalam Pasal 11 UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pesantren salah satunya untuk memenuhi aspek kesehatan di Pesantren.

“Ketentuan pasal ini penting dijalankan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga fungsi dakwah Pesantren tetap dapat berjalan sekalipun di tengah Pandemi Covid-19, di mana sesuai Pasal 42 UU Pesantren Pemerintah



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Penting agar para Tokoh Agama, Kiai/ Ulama yang masih bertahan dari dampak Covid-19 agar betul-betul dijaga kesehatan dan keselamatannya. Pemerintah bisa ambil peran, juga para Amil Zakat baik itu Baznas maupun LAZ perlu meningkatkan program beasiswa untuk santri sebagai pelanjut estafet perjuangan dakwah para kiai/Ulama yang sudah wafat itu.

Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan melalui kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan. Adapun diantara bentuk program perlindungan Pesantren adalah penyuluhan,

pendampingan, akses ke Rumah Sakit, termasuk vaksinasi bagi lingkungan Pesantren agar para Kiai/Ulama yang mukim di Pesantren bisa lebih terjaga kesehatan dan keselamatannya,” urai HNW.

# Aleg PKS Dorong Percepatan Vaksinasi bagi Santri dan Kiai Pondok Pesantren selama PPKM Darurat

**KUTIPAN**

Ketua DPP PKS ini mendesak Kementerian Agama agar turut mengadvokasi ponpes supaya memperoleh prioritas dalam program percepatan vaksinasi pemerintah.

Jakarta (03/07) — Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf meminta pemerintah menggencarkan vaksinasi bagi kalangan santri dan kiai di lingkungan pondok pesantren (ponpes), khususnya ponpes tradisional selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Bukhori mengaku khawatir dengan keselamatan para santri dan kiai di tengah ancaman keganasan Covid-19 dengan varian yang terus berkembang.

Sebelumnya, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (NU), mencatat sebanyak 333 kiai dan ulama dari NU meninggal dunia di selama pandemi virus corona (Covid-19). Kendati tidak semuanya terkonfirmasi positif, angka kematian tersebut terus merangkak seiring dengan melonjaknya

angka kasus penularan Covid-19 di Indonesia.

"Para santri dan Kiai perlu kita lihat sebagai aset. Begitupun ponpes, yang juga perlu kita pandang sebagai rumah inkubasi yang mencetak pemimpin dan ulama masa depan. Kendati demikian, keselamatan jiwa mereka tetap terancam ketika berkegiatan belajar walaupun sudah dengan prokes. Sebab ini saya meminta supaya mereka bisa segera divaksin secara menyeluruh," ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini mendesak Kementerian Agama agar turut mengadvokasi ponpes supaya memperoleh prioritas dalam program percepatan vaksinasi pemerintah.

"Kementerian Agama harus menjadi leading sector dalam upaya penyelamatan

para santri dan kiai di ponpes. Kemenag memiliki tanggung jawab untuk memastikan para santri dan Kiai tetap aman selama masa pandemi yang kian kritis belakangan ini. Sehingga, menjadi mendesak bagi Kemenag untuk memastikan sebagian besar dari mereka sudah divaksin," terangnya.

Lebih lanjut, politisi dapil Jateng 1 ini secara khusus juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius bagi sejumlah pondok pesantren di wilayah Semarang dan Kendal dimana kedua wilayah ini tercatat mengalami lonjakan kasus yang tajam.

"Sejumlah ponpes tradisional yang berada di zona merah sesungguhnya terjepit dalam kondisi rentan. Mengingat kondisi mereka yang terisolir, harus ada kepekaan dari pemerintah. Mereka butuh bantuan suplemen vitamin dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ruang isolasi yang memadai di ponpes. Saya sangat berharap pemerintah segera turun tangan membantu



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kementerian Agama harus menjadi leading sector dalam upaya penyelamatan para santri dan kiai di ponpes. Kemenag memiliki tanggung jawab untuk memastikan para santri dan Kiai tetap aman selama masa pandemi yang kian kritis belakangan ini. Sehingga, menjadi mendesak bagi Kemenag untuk memastikan sebagian besar dari mereka sudah divaksin

penyediaannya," ujarnya.

Total kasus terkonfirmasi hingga saat ini di Kota Semarang telah mencapai angka 56.465 kasus. Sementara Kabupaten Kendal sendiri menca-

kat 10.313 kasus. Alhasil, lonjakan kasus yang tajam membuat Semarang dan Kendal menjadi dua wilayah yang masuk zona merah di Jawa Tengah.

# Kemensos Serahkan Bansos Tunai saat PPKM Darurat, Aleg PKS: Prosedur Harus Jelas

## KUTIPAN

Jakarta (04/07) --- Pemerintah resmi memberlakukan PPKM darurat. PPKM darurat yang akan berlaku pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali memuat sejumlah ketentuan ketat.

Keputusan diambil Presiden setelah mendapatkan masukan dari para Menteri, ahli kesehatan, dan Kepala Daerah. PPKM Darurat diberlakukan akibat lonjakan Corona yang makin cepat imbas varian baru.

Selama penerapan PPKM darurat di Jawa-Bali. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan ada bantuan sosial tunai (BST) yang bakal diberikan kepada warga.

Menteri Sosial menyebut besaran BST yang akan diberikan adalah Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba

lubis memberi catatan pada langkah pemerintah seiring dengan kebijakan PPKM Darurat yang telah diambil.

"Bantuan sosial di masa pandemi, bahkan saat ini sudah memasuki kebijakan PPKM darurat, Bansos merupakan hal rasional dalam percepatan membantu warga masyarakat di tengah kesulitan bagi 10 juta lebih KPM (keluarga penerima manfaat) yang terdaftar di DTKS. saya sebenarnya apresiasi program ini, walau sempat dihentikan pada bulan April lalu. Hanya saja kemensos harus taat prosedur lah. kembali, pihak pemerintah melampaui kewenangannya. Bantuan untuk bulan mei dan juni ini tidak pernah didiskusikan bersama komisi 8 DPR RI." ujarnya.

Menurut Iskan, DPR harus tahu sumber pemberian Bantuan itu dari mana.

"Apakah berasal dari refo-kusing atau realokasi anggaran. jangan sampai penggunaan anggaran ini bersifat asal-asalan. intinya prosedurnya harus jelas" kata Iskan.

Selain itu, Politikus PKS Dapil Sumut II ini berharap pelaksanaan program bantuan ini harus tepat sasaran.

"Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat. Apalagi selama PPKM Darurat seluruh aktivitas masyarakat benar-benar terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bansos tepat sasaran, atau benar-benar diterima oleh mereka yang terdampak pandemi," ungkapnya.

Iskan juga menambahkan agar kemensos benar-benar teliti dalam penyalurannya dan memastikan pemutakhiran data DTKS setiap saat.

"Tidak ada lagi data ganda, tidak ada lagi uang yang mengendap di bank, kemensos harus serius dalam penanganan data terpadu. juga saya berharap



**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

"Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat. Apalagi selama PPKM Darurat seluruh aktivitas masyarakat benar-benar terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bansos tepat sasaran, atau benar-benar diterima oleh mereka yang terdampak pandemi"

bantuan selama PPKM darurat ini, tidak hanya berdasarkan dari data DTKS saja, tetapi pemerintah harus betul-betul jeli melihat masyarakat yang termasuk dalam golongan ora-

ng miskin baru akibat pandemi yang melanda. sehingga pelaksanaan bantuan dapat tepat manfaat-sasaran serta harus transparan dan akuntabilitas" pungkasnya mengakhiri.

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# WNA Terus Masuk, Wakil Ketua FPKS: PPKM di Jawa-Bali Bisa Tidak Efektif

## KUTIPAN

Jakarta (06/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, mempertanyakan masuknya 20 WN asal China ke Indonesia di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali.

"Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WNA China diistimewakan dalam PPKM Darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?", ujarnya dalam rilis media, Senin (05/07).

Menurut Netty, PPKM Darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran virus Covid 19, apalagi jika penerapannya setengah-setengah.

"Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan. Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian Covid-19. Kita khawatir PPKM

Darurat bisa jadi tidak efektif," katanya.

Lebih lanjut Netty menambahkan, PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan Covid 19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut.

"Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak," ujar Netty.

Mengutip IDI, kata Netty, lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus varian baru

dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri.

"Virus ini tidak cukup dilawan dengan sekadar menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil negatif test PCR sebelum berangkat. Tes seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara. Tidak ada jaminan selama perjalanan tidak terjadi penularan. Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru?," tanya politisi PKS ini.

Taiwan dan Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan Covid-19, seperti India, Jepang dan Arab Saudi pun diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.

"Demi keselamatan rakyat dan martabat bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru Covid-19," tutup Netty.



## Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Virus ini tidak cukup dilawan dengan sekadar menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil negatif test PCR sebelum berangkat. Tes seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara. Tidak ada jaminan selama perjalanan tidak terjadi penularan. Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru"

# Oksigen Langka, Aleg PKS: Perlu Kebijakan **Extra** **Ordinary** Pasokan Oksigen

## KUTIPAN

Jakarta (04/07) — Kasus Covid-19 yang terus meningkat dan tidak tertampung di rumah sakit menyebabkan kebutuhan oksigen juga meningkat tajam.

Banyak pasien covid-19 yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah meskipun bergejala, membutuhkan oksigen untuk menjaga saturasi oksigen dalam tubuh agar dalam kondisi aman.

Tabung oksigen pun banyak diburu dan antrian pengisian oksigen juga terjadi di tempat-tempat pengisian oksigen. Dalam situasi ini maka spekulasi juga bermunculan dengan menjual harga tabung maupun pengisian dengan harga jauh diatas harga wajar.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS yang membidangi kesehatan, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah melakukan segala upaya untuk penyediaan oksigen yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah, kata Mufida, harus mendorong pengusaha yang bergerak di bidang

produksi tabung oksigen dan produksi serta distribusi oksigen untuk melakukan mobilisasi total untuk penyediaan bagi masyarakat. Alokasi oksigen untuk industri saat ini harus dialihkan untuk kebutuhan medis baik di rumah sakit, klinik, Puskesmas maupun di masyarakat.

"Pemerintah harus dorong swasta produsen dan distributor oksigen terlibat penuh dalam mendukung penyediaan oksigen untuk kebutuhan penanganan pasien covid-19. Asosiasi pengusaha seperti APINDO, KADIN dan asosiasi produsen dan distributor gas dan oksigen harus diajak langsung untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini. Jika perlu, pemerintah buat kebijakan agar rantai pasok oksigen sampai ke konsumen masyarakat lebih dipangkas, tidak lagi melalui agen atau distributor kecil. tapi langsung

dari distributor utama. Lakukan semacam operasi pasokan langsung ke masyarakat dan faskes yang membutuhkan untuk penanganan pasien covid-19. Perlu kebijakan extra ordinary dalam situasi darurat seperti ini," ujar Mufida dalam keterangannya, Ahad (04/07).

Alokasi oksigen untuk industri harus dialokasikan untuk kepentingan medis dan kemanusiaan. Menurutnya, produsen oksigen harus prioritas produksi sampai 90%-100% untuk mendukung kebutuhan oksigen untuk medis.

Mufida juga meminta BUMN juga secara total membantu penyediaan oksigen untuk kebutuhan penanganan medis ini. "BUMN harus menjadi yang terdepan dalam situasi darurat oksigen ini", tegasnya.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga meminta pemerintah mengawasi kenaikan harga tabung oksigen dan perlengkapannya dan pengisian oksigen yang mulai tidak wajar.

"Saya mendapatkan informasi kalau harga sudah meningkat tidak wajar, sampai 500%. Harga tabung yang biasa 500 ribu melonjak sampai 2,5 juta".



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

“Pemerintah harus mendorong pengusaha yang bergerak di bidang produksi tabung oksigen dan produksi serta distribusi oksigen untuk melakukan mobilisasi total untuk penyediaan bagi masyarakat.

Alokasi oksigen untuk industri saat ini harus dialihkan untuk kebutuhan medis baik di rumah sakit, klinik, Puskesmas maupun di masyarakat.

Dirinya meminta pemerintah mengerahkan TNI dan Polri untuk mengawasi kenaikan harga ini dan menindak spekulasi yang menjual harga tabung maupun menetapkan harga pengisian oksigen jauh diatas harga wajar.

“Fungsi pengawasan harga

dan ketersediaan oksigen ini harus dilakukan juga dalam masa PPDB Darurat” ujarnya.

Jangan sampai masyarakat yang sudah mendapat musibah akibat terpapar covid-19 mendapatkan masalah lagi karena kelangkaan dan mahalnya tabung oksigen.

# Dua Menteri Hadiri Penghargaan "Ikatan Cinta Anggota DPR Ingatkan Oksigen Langka dan Mahal akibat Pandemi

## KUTIPAN

Jakarta (04/07) --- Anggota Komisi IX DPR Alifudin menyayangkan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara penghargaan kepada sinetron Ikatan Cinta, Kamis (1/7/2021).

Menurutnya, kehadiran dua menteri di tengah situasi darurat pandemi Covid-19 tersebut tidak tepat.

"Karena masalah utama pandemi Covid-19 yang paling penting dan harus dikerjakan oleh Menko Perekonomian dan Menperin," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Ia menilai, seharusnya dua menteri tersebut lebih memprioritaskan pekerjaan mengatasi pandemi Covid-19 daripada sekadar memberikan penghargaan kepada sinetron.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan ada hal lebih penting yang harus segera

diantisipasi, yakni kelangkaan dan mahalnya harga tabung oksigen.

"Saat ini langka dan mahal harga oksigen atau tabung oksigen di masa pandemi. Apalagi masyarakat dan tenaga kesehatan serta rumah sakit sangat membutuhkan oksigen sampai saat ini," ujarnya.

Kemudian, Alifudin mengingatkan, harga alat kesehatan dan kelengkapan pemulasaraan jenazah juga sangat mahal

"Harusnya Menko Perekonomian dan Menperin memikirkan bagaimana alat kesehatan dan lain-lain itu bisa tidak mahal di kalangan

masyarakat," ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini masyarakat betul-betul melihat keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Untuk itu, Alifudin juga mengingatkan agar pemerintah menghindari seremoni yang tak berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Alifudin meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam penanganan pandemi. Menurutnya, penanganan pandemi jangan hanya menjadi slogan.

"Masyarakat saat ini melihat keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19. Seremonial-seremonial yang tidak terkait penanganan Covid-19 harus dihindari," tutur dia.

Dikutip dari akun Instagram @mnc\_pictures, Airlangga dan Agus tampak menghadiri acara penghargaan yang diberikan Kemenko Perekonomian kepada sinetron Ikatan Cinta.



**H. ALIFUDIN, S.E.,M.M**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Saat ini langka dan mahal harga oksigen atau tabung oksigen di masa pandemi.

Apalagi masyarakat dan tenaga kesehatan serta rumah sakit sangat membutuhkan oksigen sampai saat ini, Harusnya Menko Perekonomian dan Menperin memikirkan bagaimana alat kesehatan dan lain-lain itu bisa tidak mahal di kalangan masyarakat."



*Mari Tetap*  
**Patuhi** Protokol  
*Kesehatan*

# Kasus Covid-19 Melonjak, Ledia Minta Kemdikbud-Ristek Segera Putuskan PJJ

KUTIPAN

Jakarta (06/07) --- Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali terkait terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Kegiatan publik dihentikan, fasilitas publik ditutup dan masyarakat kembali diminta untuk melakukan kerja dari rumah (work from home) mulai dari 3 hingga 20 Juli 2021.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, meminta Kemdikbudristek dan Pemda segera membuat keputusan terkait pembukaan tahun ajaran baru.

"Tahun ajaran baru sudah akan dimulai pada pertengahan Juli 2021. Artinya masih dalam suasana PPKM di Jawa dan Bali, maka harus ada kebijakan yang jelas dan pasti bagi sekolah agar mereka bisa fokus mempersiapkan diri. Menimbang situasi yang ada, maka keputusan memperpanjang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah bagi

anak sekolah semestinya segera diambil, demi kemaslahatan kita bersama." katanya

Ledia menjelaskan, lonjakan kasus covid-19 sudah sepatutnya menjadi perhatian semua, apalagi ditengarai banyak kasus yang ditemukan saat ini merupakan serangan covid-19 varian delta yang lebih ganas dan lebih cepat menyebar.

"Hari demi hari kita semakin banyak mendengar kabar duka menimpa kenalan, sahabat dan kerabat kita baik yang sakit maupun yang wafat karena covid-19. Bahkan jumlah anak yang terkena covid-19 juga makin banyak, menurut informasi dari Satgas Penanganan Covid ada lebih dari 260 ribu anak terpapar, sehingga kita harus sangat sigap membuat keputusan yang akan kita

ambil terkait pembukaan tahun ajaran baru," pungkasnya.

Aleg Fraksi PKS ini kemudian mengutip rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI),

"Untuk memutuskan apakah sekolah akan melakukan pembelajaran tatap muka itu kan salah satu indikatornya perlu melihat positivity rate, rekomendasi IDAI dan KPAI adalah di bawah 5 persen, atau setidaknya di bawah 10 persen. Sementara sampai saat ini angka positivity rate kita masih di kisaran 30 persen, masih berbahaya untuk melakukan pembelajaran tatap muka," terang Ledia.

Karena itulah maka Ledia meminta Kemdikbudristek dan Pemda segera mengambil keputusan terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di wilayah masing-masing.

"Kenapa harus segera? Karena tahun ajaran baru akan segera dimulai dan karenanya sekolah, pendidik, tenaga kependidikan termasuk juga orangtua harus segera mendapat kepastian agar bisa secara fokus merencanakan



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

"Kenapa harus segera? Karena tahun ajaran baru akan segera dimulai dan karenanya sekolah, pendidik, tenaga kependidikan termasuk juga orangtua harus segera mendapat kepastian agar bisa secara fokus merencanakan program dan metode pembelajaran. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan ajar mengajar, rencana pencapaian kurikulum, harus disiapkan sejak sekarang"

program dan metode pembelajaran. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan ajar mengajar, rencana pencapaian kurikulum, harus disiapkan sejak sekarang. Dengan melihat situasi dan kondisi pandemi

covid-19 di Indonesia memperpanjang PJJ kami lihat merupakan pilihan terbaik bagi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan anak didik, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua," tutup Ledia.

# Covid-19 Makin Mengganas, Anggota FPKS Harap Kemendikbudristek Tinjau Ulang PTM

## KUTIPAN

Palu (09/07) — Kasus baru penambahan dan angka kematian akibat Covid-19 semakin mengganas. Berdasarkan sebaran covid-19, provinsi yang berada di pulau Jawa menjadi provinsi penyumbang angka harian positif Covid-19 terbanyak.

Guna menurunkan penularan Covid-19 Pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Menanggapi hal ini Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, meminta Pemerintah terutama Kemdikbudristek untuk segera meninjau ulang rencana pembelajaran Tatap Muka yang seyogyanya dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru kali ini.

"Terus mengganasnya kasus Covid-19 saat ini perlu disikapi Pemerintah dengan cepat, tepat dan bijak. Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang rencananya

akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru harus ditinjau ulang pada daerah yang terus meningkat kasusnya, bahkan harus ditunda sampai kasus Covid-19 melandai," ungkapnya di Jakarta, Kamis (08/07/2021).

Terkait dengan daerah-daerah yang zona hijau atau tidak ada penambahan kasus, Sakinah mendorong pemerintah untuk dapat menyelenggarakan PTM terbatas namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Daerah yang masuk kategori zona hijau atau tidak ada penambahan kasus Covid-19, bisa melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan penerapan protokol kesehatan

yang sangat ketat," katanya.

Sakinah menambahkan Pembelajaran Tatap Muka harus menerapkan standar protokol kesehatan ketat dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

"Rencana dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka terbatas harus juga memperhatikan dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan anak didik kita. Menjaga mereka agar tidak terpapar Covid-19 adalah tugas kita bersama," ungkapnya.

Politikus perempuan asal Sulawesi Tengah ini pun meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi agar tidak terjadi lonjakan kasus di daerah zona hijau yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

"Namun di sisi lain Pemerintah juga harus melakukan antisipasi-antisipasi lanjutan kasus Covid-19 di luar pulau Jawa-Bali, jangan sampai daerah yang zona hijau terjadi penambahan kasus sehingga siswa terpapar," ujarnya.

la pun berharap agar semua warga sekolah baik



**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

**"Rencana dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka terbatas harus juga memperhatikan dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan anak didik kita. Menjaga mereka agar tidak terpapar Covid-19 adalah tugas kita bersama," ungkapnya. "**

manajemen sekolah, guru, orang tua murid dan juga masyarakat bekerja sama saling menjaga anak-anaknya agar selalu sehat dan memperhatikan proses.

"Di luar pulau Jawa seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang tadinya zona kuning

sekarang sudah masuk zona merah, hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kesadaran kita semua atas wabah ini, semoga masalah yang sedang melanda bangsa ini khususnya dan dunia pada umumnya Covid-19 cepat berakhir," pungkasnya.

# PKS Harap Tunjangan Profesi Guru Diperluas dan Diperbesar

## KUTIPAN

Jakarta (2/7) – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menyampaikan beberapa poin penting terkait Tunjangan Profesi Guru yang hingga saat ini masih memprihatinkan dan terabaikan.

Ecky mengatakan, tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya, para pendidik guru-guru dari swasta yang bukan pendidik ASN sendiri berpenghasilan sangat jauh di bawah umur.

"Kami mendorong Pemerintah memperluas dan memperbanyak kuota tunjangan profesi guru bagi guru-guru swasta, baik guru-guru yayasan maupun honorer, baik itu SD, SMP, SMA maupun madrasah," ujar Anggota Komisi XI Ecky dalam rapat kerja bersama pemerintah, Jumat (2/7).

Karena mereka telah berkontribusi mencerdaskan bangsa namun belum bisa masuk menjadi PNS atau ASN daerah.

"Mohon Pemerintah menambah kuota untuk tunjangan profesi guru dan memberikan kemudahan agar mereka mendapatkan tunjangan profesi tersebut," imbuhnya.

Lalu, Ecky melanjutkan terkait tunjangan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang hingga saat ini, begitu banyak keluhan insentif yang belum turun dan didomai pemerintah daerah.

PKS kembali mendesak, untuk menunjukkan negara kesatuan Indonesia, ter-okestra oleh pemerintahan pusat juga Presiden sebagai kepala negara agar segera direalisasikan insentif para nakes tersebut.



**H. ECKY AWAL MUCHARAM**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya, para pendidik guru-guru dari swasta yang bukan pendidik ASN sendiri berpenghasilan sangat jauh di bawah UMR. Kami mendorong Pemerintah memperluas dan memperbanyak kuota tunjangan profesi guru bagi guru-guru swasta, baik guru-guru yayasan maupun honorer, baik itu SD, SMP, SMA maupun madrasah”

Tanggapi Temuan BPK terkait Program PC-PEN,

# Aleg PKS: Semua Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan

## KUTIPAN

Jakarta (05/07) — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada Presiden di Jakarta (25/6).

Diantara poin laporan BPK terkait dengan pemeriksaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai.

Hal tersebut disebabkan oleh alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terdokifikasi secara

menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan; pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya efektif.

Atas laporan yang disampaikan BPK ini, Anggota

Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan tanggapannya.

Berbicara di Jakarta, Senin (05/07/2021), Anis mengatakan bahwa temuan BPK ini harus ditelusuri dan diungkap secara jelas dan transparan.

“Sangat ironis ditengah pandemi yang berdampak pada rakyat secara luas, justru ada temuan BPK pada penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bagaimana tata kelola anggaran dan pengendalian mekanisme kebijakan keuangan negara? Termasuk realisasi, efektivitas, pengendalian dan akuntabilitas anggaran, harus dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.

“Karena ini telah menjadi temuan BPK, maka harus menjadi perhatian semua pihak untuk diusut secara tuntas,” tegas Anis.

Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini lebih lanjut menjelaskan bahwa semua temuan BPK terkait permasalahan, harus ditindaklanjuti dan diperhatikan serius. Karena BPK adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

“Sangat ironis ditengah pandemi yang berdampak pada rakyat secara luas, justru ada temuan BPK pada penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bagaimana tata kelola anggaran dan pengendalian mekanisme kebijakan keuangan negara? Termasuk realisasi, efektivitas, pengendalian dan akuntabilitas anggaran, harus dievaluasi secara menyeluruh, Karena ini telah menjadi temuan BPK, maka harus menjadi perhatian semua pihak untuk diusut secara tuntas



**PERSEMBAHAN**  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

# LOMBA BACA TEKS PROKLAMASI MIRIP SUARA **SOEKARNO** 2021



## Tahapan Kegiatan



**8 Juli 2021**  
**Launching**  
**Lomba**



**3 Agustus 2021**  
**Batas pengumpulan**  
**video di tingkat**  
**Fraksi PKS DPRD**



**17 Agustus 2021**  
**Pengumuman**  
**Finalis 10 Besar**



**19 Agustus 2021**  
**Grand**  
**Final**

## Syarat dan Ketentuan

- Lomba ini terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak dipungut biaya apapun alias GRATIS. Lomba ini tidak berlaku bagi keluarga besar Fraksi PKS DPR RI.
- Setiap peserta diwajibkan follow akun Instagram: @fraksipksdprri, Twitter: @FPKSDPRRI, Facebook Fan Page: Fraksi PKS DPR RI.
- Durasi video maksimal 3 menit.
- Video dapat didaftarkan dengan cara:
  - Mengunggah (upload) video ke akun YouTube pribadi masing-masing peserta dengan format judul: "Lomba Membaca Teks Proklamasi F-PKS DPR RI 2021 - NAMA"
  - Mengirim url YouTube tersebut ke Fraksi PKS DPRD Provinsi di wilayahnya masing-masing, paling lambat 3 Agustus 2021.
  - Menyebarkan video yang telah diupload ke akun sosial media (Instagram/Twitter/YouTube) pribadi masing-masing peserta dengan melakukan tag ke akun Instagram: @fraksipksdprri, Twitter: @FPKSDPRRI, Facebook @FPKSDPRRI dengan mencantumkan hashtag #LombaBacaTeksProklamasiFPKSDPRRI2021
  - Upload potongan video ke akun Instagram pribadi masing-masing peserta dengan hashtag #LombaBacaTeksProklamasiFPKSDPRRI2021
  - Tag 5 akun pribadi teman terdekat dan follow akun Instagram: @fraksipksdprri

- Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan atau pelanggaran terhadap salah satu peraturan atau syarat dan ketentuan lomba, panitia berhak membatalkan kemenangan pemenang yang telah diumumkan.
- Pemenang yang telah dibatalkan wajib mengembalikan seluruh hadiah lomba dalam keadaan utuh seperti kondisi saat diterima.

## Total Hadiah Rp. 17 Juta

Juara 1	Rp. 6.000.000
Juara 2	Rp. 4.500.000
Juara 3	Rp. 3.000.000
Juara Harapan 1	Rp. 2.000.000
Juara Harapan 2	Rp. 1.500.000

## Informasi

Dwiki +62 857-1800-2227  
 Robin +62 811-8798-337  
 Iken +62 852-2800-2986



**Dr. H. JAZULI**  
**JUWANI, MA**  
 Ketua Fraksi PKS DPR RI



**Dr. SALIM**  
 Ketua Majelis Syuro PKS

# Aleg PKS Desak Pemerintah Tingkatkan PNPB Tahun 2022 Sektor Minerba

**KUTIPAN**

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto mendesak pemerintah untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga batubara dunia pada tahun ini, agar bisa meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor minerba.

"Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sampai saat ini telah memukul kinerja dunia usaha di Indonesia, salah satunya di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba). Sebagai contoh produksi batubara yang mengalami penurunan 9,5 % dari 616,16 juta ton pada tahun 2019 menjadi 557,54 juta ton di tahun 2020," ungkap Rofik.

Hal ini, imbuhnya, juga berdampak pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor minerba, yang menurun signifikan sebesar 24,1% dari 45,59 Triliun pada tahun 2019 menjadi 34,6 Triliun di tahun 2020.

"Akan tetapi, seiring dengan mulai membaiknya

perekonomian beberapa negara konsumen batubara terbesar dunia, seperti China dan Amerika Serikat, harga batu bara pada tahun 2021 melonjak drastis karena tingginya permintaan dari Negara-negara tersebut. Tercatat, per bulan Juli 2021, harga acuan batubara (HBA) mencapai US\$ 115,35 per ton, jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata di tahun 2020 sebesar US\$ 58,17 per ton atau yang terendah sejak tahun 2015," papar Rofik.

Adanya kenaikan harga ini, tambahnya, secara otomatis akan meningkatkan PNPB Minerba khususnya dari penjualan batubara secara keseluruhan di tahun 2021. Bahkan, diperkirakan harga ini akan bertahan

dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi oleh negara-negara konsumen batubara lainnya.

"Kinerja produksi dari semua tambang harus dioptimalkan, namun tetap dalam kaidah-kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ketika produksi batubara dan mineral lainnya digenjut, justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah di wilayah sekitar tambang," kata Rofik.

Selain itu, Rofik yang juga merupakan Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah lebih kreatif dalam meningkatkan PNPB sektor minerba ini.

"Selain melalui peningkatan produksi, peningkatan PNPB bisa dilakukan melalui penguatan pengawasan terhadap kewajiban pembayaran PNPB tersebut. Jangan sampai ada perusahaan yang tidak melakukan pembayaran kewajibannya seperti tahun-tahun sebelumnya, yang nilainya mencapai 4,5 Triliun."

Rofik menambahkan meskipun sebagian besar tunggakan tersebut sudah dibayarkan,

**H. ROFIK HANANTO, S.E.**

Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Kinerja produksi dari semua tambang harus dioptimalkan, namun tetap dalam kaidah-kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ketika produksi batubara dan mineral lainnya digenjut, justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah di wilayah sekitar tambang"

adanya penyimpangan tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut."

"Yang lebih penting juga adalah pemerintah bisa

menerapkan sistem pelaporan PNPB yang baik dan terintegrasi dengan sistem keuangan Negara. Melalui sistem e-PNPB yang sedang dikembangkan, diharapkan tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab tersebut."

# Anggota Banggar FPKS: Target Pertumbuhan Ekonomi, Jauh Panggang dari Api

## KUTIPAN

Jakarta (07/07) — Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang dipatok Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebesar 7-8 persen terlalu optimis dan sulit untuk dicapai.

Pemerintah harus realistis dalam merencanakan kerangka ekonomi makro dengan mempertimbangkan faktor utang pemerintah yang semakin membengkak setiap tahun.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan hal tersebut dalam keterangan tertulisnya merespon usulan APBN 2022 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (06/07/2021).

"Pertumbuhan ekonomi 7-8 persen sangat sulit tercapai ditengah sumber pembelanjaan APBN yang berasal dari utang akibat kebijakan defisit anggaran," ucapnya.

Hermanto menyebutkan kemampuan keuangan pemerintah sangat lemah. Jadwal pembayaran utang diliputi ketidakpastian. Indonesia bisa masuk kedalam debt trap (perangkap utang).

"Utang merupakan jalan pintas untuk mendapatkannya, tetapi menjadi jalan panjang dan berliku untuk pembayarannya," kata legislator dari FPKS DPR ini.

Kebijakan defisit anggaran yang diterapkan Pemerintah berakibat pada penumpukan utang dalam jangka panjang.

"Bila tidak dapat dilunasi maka menjadi beban bagi

pemerintahan berikutnya. Publik akan menilai rezim mewarisi utang bagi generasi berikutnya," ujar Hermanto.

Ia mengeluhkan, sejauh ini utang hanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek mercusuar padat modal minus trickle down effect (dampak tetesan ke bawah).

"Utang sangat minim dialokasikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, program padat karya untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran akibat hilangnya pekerjaan baik perkotaan maupun pedesaan akibat pandemi covid-19," papar Hermanto.

Lebih jauh Hermanto meminta agar kerangka ekonomi makro yang disusun pemerintah harus disertai strategi implementasi yang jelas dan kokoh kearah sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat.

"Memperhatikan infrastruktur pertanian, nelayan, penguatan anggaran pedesaan, mengatasi kelangkaan pupuk, menyerap hasil panen raya petani, perbaikan lingkungan hidup, mencegah kebakaran hutan serta penguatan modal UMKM dan Koperasi," tuturnya.

"Pemerintah dengan APBN 2022 itu harus sudah bisa mengatasi masalah dampak covid-19 yang diderita rakyat saat ini". pungkas Legislator dari Dapil Sumbar I ini.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Badan Anggaran DPR RI

“kemampuan keuangan pemerintah sangat lemah. Jadwal pembayaran utang diliputi ketidakpastian. Indonesia bisa masuk kedalam debt trap (perangkap utang). Utang merupakan jalan pintas untuk mendapatkannya, tetapi menjadi jalan panjang dan berliku untuk pembayarannya”

## Rapat Paripurna Bahas RAPBN 2022

# Politisi PKS Tetap Kawal Anggaran Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data

### KUTIPAN

Jakarta (06/07) — Anggota DPR RI asal PKS, Nevi Zuairina pada gelaran Rapat Paripurna dengan pokok bahasan Rancangan APBN 2022 yang tengah memasuki pembahasan krusial di DPR-RI,

tetap menyuarakan alokasi APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang sebelumnya ia bahas di rapat Komisi.

Rapat paripurna yang di laksanakan pada Selasa (6/7/2021) mengagendakan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 yang di hadir semua perwakilan fraksi di DPR.

Nevi mengatakan, Fraksi PKS terus menerus mendorong anggaran untuk penguatan Digitalisasi UMKM berbasis data tunggal. Usulan bahasan ini telah di dimulai sejak rapat-rapat di Komisi VI tempat ia bermitra dengan pemerintah. Menurutnya, perbaikan data UMKM penerima bantuan dan membangun Link and Match antara UMKM dengan BUMN, Swasta dan Pasar mesti segera

dibangun sehingga di masa datang akan ada kemudahan berbagai hal dalam tata kelola dan tata laksana industri dan perdagangan secara nasional.

"Anggaran untuk Digitalisasi UMKM sangat penting untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dalam masa pandemi ini. Kebijakan yang nantinya akan menguntungkan rakyat banyak mesti segera di gesah, sehingga rakyat dapat merasakan secara langsung kebijakan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Politisi PKS ini.

Saat ini, lanjut Nevi, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, yang lebih menyukai belanja

secara online. Jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital baru mencapai 12 juta pelaku usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi UMKM per Februari 2021.

"Ini artinya baru 13 % dari total 64 juta pelaku UMKM, masih sangat kecil," jelas Nevi.

Nevi merujuk pada Undang Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, dimana ada pengaturan kebijakan 40% belanja barang dan jasa pemerintah diperuntukan bagi UMKM. Amanah UU Cipta kerja, harus dioptimalkan khususnya di masa pandemi ini. Belanja barang dan jasa BUMN bisa melibatkan UMKM, sehingga UMKM masuk dalam rantai pasok bagi industri di BUMN dan perusahaan swasta

"Ketika digitalisasi UMKM dan perbaikan data ini sudah terbentuk dengan kokoh, kedepannya diharapkan akan terjadi banyak efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan usaha di kalangan UMKM.

UMKM secara bertahap pada setiap levelnya secara berkala dapat merubah levelnya yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

"Ketika digitalisasi UMKM dan perbaikan data ini sudah terbentuk dengan kokoh, kedepannya diharapkan akan terjadi banyak efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan usaha di kalangan UMKM. UMKM secara bertahap pada setiap levelnya secara berkala dapat merubah levelnya yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah dan yang menengah sudah keluar dari lingkaran UMKM "

menengah dan yang menengah sudah keluar dari lingkaran UMKM. Selain itu, pertumbuhan UMKM baru juga diharapkan

dapat semakin tumbuh dan berkembang lebih banyak secara kuantitas," pungkas Nevi Zuairina.



*Turut  
Berduka  
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas wafatnya

# **KH. Abdul Rosyid bin KH Abdullah Syafi'i**

Pimpinan Ponpes Asy-Syafi'iyah

Pada Sabtu, 10 Juli 2021  
Pk. 17.53 WIB

Semoga Allah SWT menerima  
amal ibadahnya serta  
menempatkannya di tempat  
terbaik Jannah-Nya Amin



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

# Hermanto Resmikan Lahan Percontohan Presisi Bawang Merah di Dapil

## KUTIPAN

Padang (03/07) --- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto, meresmikan dimulainya kegiatan Demfarm (percontohan) Pertanian Presisi Bawang Merah

Di Lahan Kering Dataran Tinggi Sumatera Barat yang dikembangkan oleh Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementerian Pertanian, Jumat (2/7/2021).

Kegiatan dilakukan di Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

"DPR berkomitmen mendorong anak bangsa untuk mengembangkan teknologi, khususnya di bidang pertanian. Teknologi bisa menghemat waktu, biaya, mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas," papar Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

"Teknologi bisa menekan biaya dan produk yang dihasilkan bisa diserap pasar dengan harga yang relatif tinggi. Harapannya, dengan menggunakan teknologi maka kesejahteraan petani

meningkat," tambah legislator dari FPKS DPR ini.

Untuk kesejahteraan petani, katanya, perlu dilakukan kolaborasi yang berkelanjutan dalam hal teknologi, pengalaman di lapangan dan anggaran.

"Dari pengalaman di lapangan Badan Litbang Pertanian terus melakukan inovasi teknologi. Sementara Komisi IV DPR mendukung dengan anggaran," tutur legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Sementara itu, Kepala BBSDLP, Husnain menjelaskan, yang dimaksud pertanian presisi bawang merah adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan sarana produksi bawang merah secara cukup, tidak berlebihan. Air, pupuk dan pengendalian hama/penyakit digunakan secukupnya. Namun demikian hasil panennya nanti bisa lebih baik.

Salah satu yang

diperagakan dalam kegiatan tersebut adalah teknologi irigasi curah. Berupa rangkaian pipa yang sambung menyambung sehingga dengan hanya membuka kran maka air bisa menyirami sekitar 10 hektar lahan tanam bawang merah yang menjadi lokasi percontohan. Dengan teknologi tersebut, air cukup dialirkan selama 15 menit, semua tanaman tercukupi kebutuhan airnya.

Selain menjamin kecukupan air, teknologi irigasi curah ini bisa mengurangi serangan penyakit embun tepung. Dengan demikian bisa mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan fungisida pada pertanaman bawang merah.

Disamping Hermanto dan Husnain, hadir juga dalam kegiatan ini Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Kepala BPTP Sumbar Wahyu Wibawa, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar Yulfiardi, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Feri Arius, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Indra Dwipa dan tokoh muda setempat Adib Fadil.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

“DPR berkomitmen mendorong anak bangsa untuk mengembangkan teknologi, khususnya di bidang pertanian. Teknologi bisa menghemat waktu, biaya, mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, Teknologi bisa menekan biaya dan produk yang dihasilkan bisa diserap pasar dengan harga yang relatif tinggi. Harapannya, dengan menggunakan teknologi maka kesejahteraan petani meningkat”

# Dukung Destinasi Pariwisata Sumbar, Nevi Zuairina Gagas Pengembangan Homestay UMKM

## KUTIPAN

Bukittinggi (04/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina dalam dialog membahas memajukan pariwisata di Sumatera Barat

yang juga dihadiri Walikota beserta Wakil Walikota Bukittinggi turut urun rembuk mencari solusi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi wisatawan sehingga terjadi persepsi yang sangat baik pada Sumatera Barat dari seluruh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Saat ini kita ketahui, bahwa pandemi covid-19 belum juga usai. Berbagai Negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19. Selain menciptakan krisis kesehatan global, upaya supresi dan mitigasi pandemi Covid-19 juga menimbulkan disruption yang kuat pada tatanan perdagangan internasional. Apalagi dengan munculnya jenis mutasi baru SAR COV2 yang sangat ganas dan mudah

menyebarkan sehingga Indonesia sangat perlu memberlakukan ptkm darurat terhitung 3-20 Juli nanti dengan berbagai pengetatan pada banyak hal", tutur Nevi.

Namun kondisi pandemi yang tak berujung ini, lanjut Nevi, kita perlu mempersiapkan banyak hal dimana suatu ketika pandemi berakhir, hal-hal yang perlu disiapkan untuk kebutuhan pariwisata telah siap sedia.

Nevi meyakini, kewirausahaan yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Pengembangan Homestay yang dikelola UMKM, kata Nevi, akan menjadi sebuah solusi penguatan ekonomi rakyat kecil secara merata dalam jangka pendek di masa pandemi, dan jangka panjang ketika pandemi berakhir. Karena bila ini dilakukan merata pada daerah-daerah yang berpotensi pada pengembangan wisata, UMKM akan menjalankan perannya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang berkontribusi sekitar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Pada 2018, UMKM tercatat sebanyak 64,2 juta unit dan tentu akan semakin bertambah.

"Banyak kita temukan, saat ini UMKM memiliki tingkat ketahanan tinggi ketika menghadapi krisis, dibandingkan usaha besar. Hal ini salah satunya karena mereka bergabung dengan komunitas wirausahawan. Para UMKM tak hanya sebatas untuk meningkatkan pengeta-



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Banyak kita temukan, saat ini UMKM memiliki tingkat ketahanan tinggi ketika menghadapi krisis, dibandingkan usaha besar. Hal ini salah satunya karena mereka bergabung dengan komunitas wirausahawan"

huan, tapi agar dapat saling menguatkan, membantu dalam memenuhi bahan produksi, termasuk mempromosikan usaha. Kerjasama usaha ini dapat meningkatkan efisiensi, berbagi beban kerja dan bahkan mendapatkan ide-ide baru. Ketika semua melakukan

social distancing, stay at home, go online, dari semua itu kita dapat temukan peluang di dalamnya, sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan", urai Nevi Zuairina dalam sambutannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Terjadi Kelangkaan Oksigen di RS Sarjito, Politisi PKS: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan!

## KUTIPAN

Yogyakarta (04/07) -- Sebanyak 63 pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito, Yogyakarta, dikabarkan meninggal dalam sehari semalam, karena keterlambatan pasokan oksigen, Sabtu, (03/07/2021).

Menanggapi hal ini Anggota DPR RI asal DIY, Sukamta menyatakan belasungkawa dan duka cita yang mendalam. Menurutny kejadian keterlambatan pasokan oksigen ini sangat tragis dan harus segera diantisipasi agar tidak terulang.

"Pak Menkes seminggu yang lalu menyatakan menjamin pasokan oksigen untuk rumah sakit, ternyata di RS Sarjito dan beberapa rumah sakit di DIY alami kelangkaan oksigen. Bahkan POLRI hingga para produsen juga mengatakan menjamin ketersediaan oksigen. Kenyataannya di Yogyakarta, RS

Sarjito dan beberapa rumah sakit terjadi kelangkaan. Antara jaminan Pak Menkes dengan kondisi lapangan tidak sesuai. Dengan kondisi RS yang saat ini sudah kedodoran tangan pasien covid, kelangkaan oksigen ini akibatnya sangat fatal," ungkapnya.

Oleh sebab itu Wakil Ketua Fraksi PKS ini minta Pak Menkes untuk cek lapangan dan segera turun tangan.

"Sangat penting Pak Menkes dalam situasi darurat saat ini untuk terus cek kondisi lapangan, tidak hanya cukup tiap hari. Jika perlu tiap jam dan tiap menit. Supaya semua perkembangan di lapangan

yang terjadi di daerah-daerah diketahui dengan baik dan bisa segera diantisipasi. Mohon jangan sampai kelangkaan oksigen ini terjadi, yang dipertaruhkan nyawa," terang Sukamta.

Lebih lanjut Sukamta juga mengusulkan sebagai antisipasi angka panjang agar setiap rumah sakit bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk dilengkapi generator oksigen.

"Prediksi dari para ahli, pandemi covid ini bisa terjadi dalam beberapa gelombang. Maka ledakan jumlah pasien ke rumah sakit bisa terjadi kapan saja. Maka setiap rumah sakit perlu diperkuat dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Termasuk yang sangat krusial adalah kebutuhan oksigen. Pemerintah dalam hal ini bisa fasilitasi pengadaan generator oksigen di rumah sakit di daerah-daerah," tutup Sukamta.



## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Di Yogyakarta

"Sangat penting Pak Menkes dalam situasi darurat saat ini untuk terus cek kondisi lapangan, tidak hanya cukup tiap hari. Jika perlu tiap jam dan tiap menit. Supaya semua perkembangan di lapangan yang terjadi di daerah-daerah diketahui dengan baik dan bisa segera diantisipasi. Mohon jangan sampai kelangkaan oksigen ini terjadi, yang dipertaruhkan nyawa,"



*Turut  
Berduka  
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas wafatnya

## **Dr. KH. A. Lutfi Fathullah, M.A.**

Direktur Pusat Kajian Hadits

Pada Ahad, 11 Juli 2021/2 Dzulhijjah 1442H  
Di RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan

Semoga Allah SWT menerima  
amal ibadahnya serta  
menempatkannya di tempat  
terbaik Jannah-Nya Amin



**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**

**Sekretaris Fraksi PKS DPR RI**

## Upaya Memutus Rantai Penularan Covid-19

# Aleg PKS Berikan Bantuan Masker di Dapil

### KUTIPAN

Tasikmalaya (06/07) --- Guna memutus rantai penularan Covid 19, Aleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) DPR RI Toriq Hidayat memberikan bantuan ribuan masker ke masyarakat di dapilnya yang meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.

"Aturan PPKM Darurat yang berlaku 3 - 20 Juli itu antara lain, Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. Betapa pentingnya manfaat masker saat ini", sebutnya

Warga perum mutiara putra ciawi regency (MPCR) kecamatan Ciawi menjadi salah satu lokasi pemberian bantuan masker oleh Anggota Komisi V ini. Sebanyak 1000 buah masker di terima oleh ketua Forum Warga MPCR dan di hadiri oleh ketua RT dan RW dan perwakilan warga serta tokoh masyarakat setempat.

"Semoga ikhtiar yang dilakukan dapat meringankan

sesama di masa PPKM darurat saat ini. Sekaligus menumbuhkan solidaritas bersama, bahwa kita secara kolektif akan bisa melewati kondisi ini dengan segera dan korban jiwa dapat diminimalkan," ucap Toriq.

Ia menekankan, sesuai dengan protokol Kesehatan yang berlaku, kegiatan pembagian bantuan masker ini hanya diberikan secara langsung kepada tokoh masyarakat setempat seperti Ketua RW dan atau Ketua RT, bukan dengan mengumpulkan massa.

Toriq menghimbau agar masyarakat di dapilnya tetap waspada dan mengikuti seluruh instruksi pemerintah di masa PPKM darurat. Seperti menjaga

jarak sosial, bekerja dan belajar dari rumah, tidak bepergian dan tidak mendatangi keramaian.

"Saya mohon kepada warga Tasikmalaya dan Garut untuk tetap tenang dan waspada, patuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.

Gubernur Jabar mengatakan, dari seluruh daerah di Jawa Barat ada 12 Kota/Kabupaten yang masuk zona merah, 14 Kota/Kabupaten di zona oranye dan 1 Kabupaten di Zona kuning yakni Kabupaten Tasikmalaya. Namun seluruh 27 kota/kabupaten Jawa Barat tetap melaksanakan PPKM Darurat.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Semoga ikhtiar yang dilakukan dapat meringankan sesama di masa PPKM darurat saat ini. Sekaligus menumbuhkan solidaritas bersama, bahwa kita secara kolektif akan bisa melewati kondisi ini dengan segera dan korban jiwa dapat diminimalkan

Tingkatan Produksi Beras

# Andi Akmal Lakukan Sosialisasi dan Bimtek Pengembangan Benih Padi

**KUTIPAN**

Kabupaten Bone (06/07) --- Pelatihan yang kerap disebut Bimtek atau Bimbingan Teknis untuk petani guna meningkatkan produksi padi mulai dari hulu hingga hilir terus di galakkan pemerintah dan DPR.

Anggota DPR RI komisi IV asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin kali ini bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, melalui Balai pengkajian teknologi pertanian Sulsel melaksanakan bimtek untuk petani dengan tema pengembangan benih sumber padi hasil inovasi balitbangtan.

Kegiatan yang di hadiri ratusan petani tanaman pangan ini dilakukan di desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone di hadiri selain oleh Andi Akmal Sendiri selaku anggota DPR RI, juga di hadiri kepala dinas ketahanan pangan (Ketapang) Asman Sulaiman, dan kepala BPTP kementan.

"Bapak-bapak sekalian, profesi petani saat ini sangatlah strategis untuk

mempertahankan perekonomian negara kita. Dimana hamir semua sektor guncang akibat pandemi covid 19 yang kini telah masuk di gelombang ke dua, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan karena pangan ini adalah sumber kehidupan yang selalu akan dibutuhkan. Saya berharap, para petani terus bersemangat dalam menanam, dan dengan tehnik bercocok tanam yang terus berkembang, mulai dari pola, jenis benih, tehnik pengairan, tehnik pengolahan tanah, tehnik pemupukan hingga tehnik pemanenan, semua terus berkembang. Untuk itu, selain kita terus bekerja, jangan lupa terus belajar meningkatkan pengetahuan

mengupdate ilmu-ilmu yang terbaru", kata Akmal dalam sambutannya.

Politisi PKS ini menerangkan, bersama seluruh rekannya di PKS maupun di Komisi IV DPR, terus mengupayakan peningkatan anggaran sektor pertanian. Saat ini, tambahhya, serapan anggaran kementerian masih tergolong rendah, padahal waktu berjalan lebih dari setengah tahun untuk tahun 2021 ini. Rekomendasi PKS adalah agar pemerintah dapat lebih fokus dalam pengembangan tanaman pangan untuk meningkatkan serapan anggaran karena di lapangan masih banyak yang terbelakal dalam upaya peningkatan jumlah produksi tanaman pangan.

"Saya berharap, meski terlihat sangat minimalis pada penganggaran di kementan, tapi tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri mesti terus di jaga terutama pangan pokok.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

Bapak-bapak sekalian, profesi petani saat ini sangatlah strategis untuk mempertahankan perekonomian negara kita. Dimana hamir semua sektor guncang akibat pandemi covid 19 yang kini telah masuk di gelombang ke dua, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan karena pangan ini adalah sumber kehidupan yang selalu akan dibutuhkan.

Hadiri Panen Raya di Dapil,

# Slamet Dapat Apresiasi dari para Petani di Desa Bojongsoka Kebonpedes

## KUTIPAN

Sukabumi (05/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet mendapat sambutan para petani di kecamatan Bojongsoka, kabupaten Sukabumi.

Pasalnya, Anggota DPR asal Dapil Sukabumi ini telah membantu dan mensukseskan panen raya padi di daerah tersebut.

Para petani yang tergabung dalam kelompok tani di Bojongsoka, selama ini mendapat bantuan dimulai dari sejak persiapan masa tanam hingga perawatan dari anggota dpr asal sukabumi ini. Ucapan syukur dan terima kasih terus di sampaikan para petani kepada Slamet karena selama ini, telah terjun langsung bersama para team dan relawannya, memberikan bantuan materil dan spirituil sehingga semangat bercocok tanam terus hidup di kalangan petani Sukabumi.

"Saya merasa gembira ketika melihat para petani ini

bahagia mendapatkan hasil komoditas pertaniannya memberikan hasil terutama untuk keluarganya. Minimal produksi padi atau tanaman pangan apapun di sini mampu memberi sumbangsi ketersediaan pangan di seluruh kecamatan. Bahkan surplus ketersediaan komoditas pangan ini bisa di gabung dengan ketersediaan di seluruh kabupaten untuk menyuplai kebutuhan di kota atau kabupaten sekitar Sukabumi", tutur Slamet.

Politisi PKS yang bermitra dengan kementerian teknis di komisi IV DPR ini menerangkan, bahwa upaya bantuan ini merupakan upaya kerjasama antara dpr dan pemerintah untuk memenuhi aspirasi

masyarakat di daerah yang merupakan sentra-sentra produksi pertanian. Dalam menjalankan fungsi nya sebagai legislator, Slamet menjalankan fungsi pengawasan dan sumpah jabatannya untuk memajukan daerah pemilihan termasuk salah satunya menyambungkan antara permintaan masyarakat dengan pemerintah secara langsung.

"Saya harap, semua upaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Ketika tepat sasaran, maka akan terjadi efisiensi yang baik sehingga tujuan negara dengan anggaran yang dimiliki akan mendapat capaian-capaian yang memuaskan. Saya berterima kasih juga pada semua pihak yang telah memudahkan petani dalam mengakses kebutuhannya guna peningkatan produksi pertanian pangan yang selama ini mengalami banyak keterbatasan", tutup Slamet.



## drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

"Saya merasa gembira ketika melihat para petani ini bahagia mendapatkan hasil komoditas pertaniannya memberikan hasil terutama untuk keluarganya. Minimal produksi padi atau tanaman pangan apapun di sini mampu memberi sumbangsi ketersediaan pangan di seluruh kecamatan. Bahkan surplus ketersediaan komoditas pangan ini bisa di gabung dengan ketersediaan di seluruh kabupaten untuk menyuplai kebutuhan di kota atau kabupaten sekitar Sukabumi"



### Profil

- Nama Lengkap  
**Drs. H. Hamid Noor Yasin, M.M.**
- Tempat, Tanggal Lahir  
**Pacitan, 27 Mei 1969**
- Dapil  
**Jawa Tengah IV**



### Pendidikan

- MAN Pacitan
- S1 - Fisipol, Universitas  
Darul Ulum Jombang
- S2 - Manajemen, STIE  
AUB Surakarta



### Riwayat Organisasi

- Sekum DPD PKS Kab. Wonogiri, 1999-2004
- Ketua Bidang Kebijakan Public DPD PKS  
Kab. Wonogiri, 2004-2009
- Banleg DPW Jateng, 2009-2014
- Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS  
Wilda Jatijaya, 2015-2019
- BP3 DPP PKS, 2019 -2024
- Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren  
AL-HUDA Wonogiri
- Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan  
Islam Terpadu AL-HUDA Wonogiri



# HAMID NOOR YASIN



### Keluarga

- Istri : **Dra. Hj. Endang  
Anggrahini**
- Anak : **4 Laki-Laki  
1 Perempuan**



### Riwayat Pekerjaan

- Anggota DPRD Kab. Wonogiri,  
1999-2004
- Anggota DPRD Kab. Wonogiri,  
2004-2009
- Anggota (Wakil Ketua) DPRD  
Kab. Wonogiri, 2009-2014.
- Anggota DPR RI, 2014-2015
- Direktur CV Giriwana  
Multidaya, 2015-2019
- Komisaris Utama PT Telaga  
Mulya Abadi, 2015-sekarang
- Anggota DPR RI, 2019-2024



### Media Sosial

- Facebook : **Hamid Noor Yasin** | Website : **hamidnooryasin.com**
- Twitter : **@HamidNoorYasin**
- Instagram : **@hamidnooryasinsimp**

- Penasehat Paguyuban Seniman Jalanan  
Wonogiri (PSJW)
- Penasehat Paguyuban Pedagang Asongan  
Wonogiri (P3AW)
- Penasehat Paguyuban Pedagang dan  
Pengasong Koran Wonogiri (P3KW)

# Terima Aspirasi Nelayan Kamal Muara, Aleg PKS: Ini Hak Masyarakat, Kita Harus Dorong

## KUTIPAN

Jakarta (9/07) - Anggota Komisi VII Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menerima aspirasi terkait permohonan ganti rugi Nelayan Kamal Muara akibat kasus kebocoran minyak Pertamina yang menyebabkan kerugian pada nelayan.

Turut hadir Anggota Fraksi PKS DPR RI lintas komisi yaitu Amin Ak, Slamet dan Johan Rosihan pada Hari Aspirasi yang dilangsungkan secara virtual, Jumat (9/7/2021).

Dalam menanggapi aspirasi dari Komunitas Nelayan Kamal Muara, Mulyanto mengatakan ingin memperjuangkan hak para Nelayan Kamal Muara agar segera mendapat uang ganti rugi dengan menyampaikan secara langsung kepada Kementerian BUMN atau Pertamina dalam rapat kedepannya.

Mulyanto menambahkan bahwa pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sigap dalam mendukung kasus kebocoran minyak Pertamina ini dan memastikan agar uang

ganti rugi didapatkan oleh pihak yang berhak untuk mendapatkannya yaitu nelayan tangkap.

"Mereka sudah melaksanakan rapat-rapat, Alhamdulillah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kelihatannya sangat sigap sehingga semua stakeholder dikumpulkan. saya baca itu hanya ada persoalan, pertama di jumlah orang minta dipastikan agar betul betul warga yang mendapatkan ganti rugi adalah nelayan tangkap," ujar Mulyanto.

Anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Banten ini memperjelas terkait tuntutan Komunitas Nelayan Tangkap Kamal Muara berupa uang ganti rugi sebesar Rp.300.000 untuk 57 hari kepada 351

nelayan dan ganti rugi alat tangkap sebesar Rp. 5.000.000 per nelayan.

"Tadi penggantian juga berupa uang sebesar Rp.300.000 per orang yang diberikan selama 57 hari. ditambah dengan tadi pergantian alat Rp. 5.000.000 per nelayan. nah ini tuntutan nelayan yang telah disepakati," tutur Mulyanto.

Mulyanto menegaskan bahwa hambatan yang ditemui dalam proses penyampaian tuntutan Nelayan Kamal Muara adalah masalah birokrasi yang terhalang oleh pandemi.

"Ternyata memang terjadi keterlambatan adalah di birokrasi dan pengajuan ke Pertamina. jadi sekarang kuncinya adalah Pertamina mau tidak ganti rugi. jadi tuntutan sudah jelas buat kita. nah karena harapan saya memang yang paling powerful itu Komisi VI lalu Komisi VII, kalau KKP saya rasa sudah bagus itu, sudah sigap," tegas Mulyanto.

Mulyanto menyatakan bahwa akan membantu mendorong dalam aspek media terhadap tuntutan Nelayan Kamal Muara. Ia menambahkan



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

"Mereka sudah melaksanakan rapat-rapat, Alhamdulillah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kelihatannya sangat sigap sehingga semua stakeholder dikumpulkan. saya baca itu hanya ada persoalan, pertama di jumlah orang minta dipastikan agar betul betul warga yang mendapatkan ganti rugi adalah nelayan tangkap"

bahwa hambatan birokrasi dapat diselesaikan dengan pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP)

"Mungkin saya akan bantu di aspek media juga dan seperti yang Pak Amin katakan, kita

tidak kuat kalau hanya virtual. Kalau bisa barang lengkap kita sampaikan dalam pertemuan RDP difoto terus dikawal. Jadi nanti di lapangan teman teman DKI harus mengawal terus agar ini terwujud," ungkap Mulyanto.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# *Salurkan* **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

**Ajuan Aspirasi**

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

# HNW Kritik Manuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden dengan Dekrit Atau Amandemen Konstitusi

## KUTIPAN

Jakarta (03/07) --- Di saat covid-19 makin mengganas, hingga akhirnya Pemerintah berlakukan PPKM Darurat,

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menyesalkan berbagai pihak di luar MPR yang masih bermanuver dan mewacanakan hal inkonstitusional perpanjangan masa jabatan Presiden dengan amandemen UUD NRI 1945 via referendum atau dengan dekrit Presiden.

Padahal, kata Hidayat, ditengah pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, mestinya semua manuver, langkah dan kebijakan yang ditempuh adalah yang konstitusional dan membantu bangsa dan negara sebagai kontribusi konstruktif untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara dari covid-19 dan segala dampaknya.

Karenanya, HNW sapaan akrabnya mengkritisi berbagai usulan dari politisi dan para aktivis yang menginginkan

Presiden Joko Widodo menerbitkan dekrit untuk menambah masa jabatan presiden karena kondisi darurat Covid-19.

"Karena selain itu inkonstitusional, juga tak sesuai dengan fakta global terjadinya covid-19 seperti di AS, New Zealand dan Iran, tapi tak dipakai sebagai alasan untuk merubah konstitusi maupun untuk memperpanjang masa jabatan Presiden," jelasnya.

Tapi, lanjut HNW, manuver itu sering disebut sebagai kelanjutan dari skenario inkonstitusional yang dilontarkan sebelumnya; seperti melalui pembentukan Seknas dan usulan Referendum untuk ubah UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

"Ada lagi yang melontarkan wacana perpanjangan tahun masa jabatan dengan ditambah 2 atau 3 tahun dengan alasan

bahwa dulu Presiden Habibie dan Soeharto dan Soekarno juga tidak per 5 tahunan dan lain sebagainya. Padahal peristiwa terkait Presiden Soekarno, Soeharto dan Habibie, semuanya terjadi pada era UUD 45 pasal 7 yang belum diamandemen, yang memungkinkan adanya celah itu," terang HNW.

"Tapi kondisi konstitusionalnya sekarang sudah berubah, tegas HNW, yang berlaku sekarang adalah UUD NRI 1945 pasal 7 hasil perubahan, yang sangat jelas dan tegas memberikan pembatasan masa jabatan Presiden hanya 2 periode saja, dan setiap peroidenya adalah 5 tahun," imbuhnya.

HNW menilai bahwa manuver dan skenario-skenario inkonstitusional semacam ini bukan hanya tidak sesuai dengan komitmen taat konstitusi, spirit demokrasi, dan cita-cita Reformasi, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip tata krama dan kepatutan karena tetap ngotot dilakukan hal inkonstitusional di tengah ketidakberhasilan Negara atasi pandemi covid-19, ditengah keprihatinan



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Wakil Ketua MPR RI

"Semestinya dalam suasana Covid-19 yang makin mencekam, apalagi Pemerintah akhirnya mengeluarkan PPKM Darurat, mestinya semua pihak berkontribusi atasi masalah dengan melakukan manuver politik yang menentramkan dan menghadirkan solusi, agar Rakyat tidak bingung dan tidak resah.

Bangsa berlutut atasi darurat nasional pandemi covid-19.

"Semestinya dalam suasana Covid-19 yang makin mencekam, apalagi Pemerintah akhirnya mengeluarkan PPKM Darurat, mestinya semua pihak

berkontribusi atasi masalah dengan melakukan manuver politik yang menentramkan dan menghadirkan solusi, agar Rakyat tidak bingung dan tidak resah  
Selengkapnya di fraksi.pks.id



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***